

SINERGI

BULETIN BPIW



Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR



www.bpiw.pu.go.id



Edisi 20/ Agustus 2017

BPIW Kawal *Integrated Tourism Masterplan* di 3 KSPN

PUPR Dukung Pengembangan Infrastruktur
KTM Kawasan Transmigrasi

Memacu Akselerasi Pengembangan KSPN
dan KTM Kawasan Transmigrasi



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR**

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI

Gedung BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: humasbpiw@gmail.com

Telp. +6221-2751 5804



www.bpiw.pu.go.id



[@informasiBPIW](https://twitter.com/informasiBPIW)



[@informasiBPIW](https://www.instagram.com/informasiBPIW)



[Layanan Informasi BPIW](#)



[BPIWkementerianPUPR](#)

SINERGI

BULETIN BPIW

Pelindung:

Rido Matari Ichwan

Penasehat:

Firman Hatorangan

Pengarah:

Bobby Prabowo
Iwan Nurwanto
Hadi Sucahyono
Agusta Ersada Sinulingga

Pemimpin Redaksi:

P. Yudantoro

Redaktur Pelaksana:

Shoviah

Redaksi:

M. Salahudin Rasyidi
Mochammad Tranggono
Hari Suharto Diyaksa
Erwin Adhi Setyadi
Wahyu Hendrastomo
Melva Eryani Marpaung

Editor :

Hendra Djamal

Kontributor:

Mutri Batul Aini
Indira Dwi Kusumatuti
Daris Anugrah
Andhika Prabowo

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:

Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
humasbpiw@pu.go.id
Website: www.bpiw.pu.go.id
Twitter: @informasiBPIW
Youtube: Layanan informasi BPIW
Facebook: BPIWkementerianPUPR
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com

Design : Heri Hito
Kartunis: Muhammad Nadjib

SALAM REDAKSI

.....

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam edisi bulan Agustus 2017 memfokuskan pada pengembangan infrastruktur di kawasan prioritas, seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Dalam kabar utama secara mendalam mengangkat tema percepatan pengembangan infrastruktur kawasan pariwisata melalui *integrated tourism masterplan*.

Untuk membahas lebih lanjut masalah tersebut, kami menghadirkan Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata, Hiramasyah S. Thaib dalam rubrik wawancara. Pada rubrik tersebut dibahas seputar arah kebijakan dan prioritas pengembangan kawasan pariwisata.

Untuk laporan khusus dibahas mengenai pengembangan KTM di kawasan transmigrasi. Pada edisi ini pembaca juga dapat menikmati sajian informasi menarik mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan Agustus melalui rubrik Kilas BPIW.

Tidak hanya itu, sajian ringan juga telah disiapkan tim redaksi seperti rubrik Jalan-Jalan yang menampilkan destinasi wisata di Yogyakarta.

Kemudian dalam rubrik Tips dibahas mengenai Cara Membangun Hubungan Baik dengan Atasan di Kantor. Kemudian pada rubrik Glossary menampilkan istilah tentang pariwisata. Kami berharap apa yang disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.

04



01 SALAM REDAKSI

02 DAFTAR ISI

03 PERSPEKTIF

Memacu Akselerasi Pengembangan KSPN dan KTM Kawasan Transmigrasi

04 KABAR UTAMA

BPIW Kawal *Integrated Tourism Masterplan* di 3 KSPN

10 REVIEW

Pembangunan Kota Optimum, Efisien dan Mandiri

11 GLOSSARY

Istilah Tentang Pariwisata

12



12 WAWANCARA

Hiramshyah S. Thaib : Peran BPIW Sangat Vital Dalam Mendukung Aksesibilitas Kawasan Pariwisata

16 TEROPONG MEDIA

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

44



20



20 KILAS BPIW

Kementerian PUPR Dukung infrastruktur di Karangasem melalui WPS 15

44 LAPORAN KHUSUS

PUPR Dukung Pengembangan Infrastruktur KTM Kawasan Transmigrasi

48 OPINI

Pengembangan Wilayah Berbasis Teknologi (Bagian 1)

54 JALAN-JALAN

Menikmati Keramahan dan Romatika Kota Yogyakarta

58 TEKNOLOGI

Aspal Plastik, Stabilitas Jalan Meningkatkan 40 Persen

60 POTRET

Tinjauan BPIW ke kota Baru Publik Tanjung Selor

67 TOKOH

Irianto Lamrie:
Infrastruktur di Kaltara Alami Kemajuan Signifikan

67



Memacu Akselerasi Pengembangan KSPN dan KTM Kawasan Transmigrasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) terus memacu akselerasi pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas.

Dukungan Kementerian PUPR itu seperti sistem konektivitas untuk memberikan kemudahan akses menuju KSPN. Terwujudnya kemudahan akses diharapkan akan mendorong angka kunjungan wisatawan, terutama dari mancanegara.

Infrastruktur PUPR juga mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan di dalam kawasan wisata. Selain itu, ada dukungan berupa sarana hunian atau perumahan untuk para pekerja di kawasan tersebut.

Saat ini pemerintah memfokuskan pada pengembangan 10+2 KSPN prioritas yakni Toraja dan Mandeh. Adapun 10 KSPN tersebut, yakni KSPN Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo dan Morotai.

Dari 10+2 KSPN prioritas itu, ada 3 KSPN yang pengembangannya akan dibantu dana pinjaman dari Bank Dunia. Ketiga KSPN itu yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah) dan Mandalika (NTB). Dalam penanganan KSPN tersebut Kementerian PUPR melalui BPIW untuk mengawal penyusunan *integrated tourism masterplan*.

Selain mendukung pengembangan kawasan pariwisata, Kementerian PUPR melalui BPIW juga mendukung percepatan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Kementerian PUPR memprioritaskan KTM yang berada di area Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan KTM yang telah memenuhi kriteria terkait kesiapan pengembangan infrastruktur.

Guna melakukan percepatan pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi, Kementerian PUPR telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT).

Diharapkan dukungan infrastruktur PUPR akan mempercepat pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi, sehingga mampu mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti akselerasi pengembangan agrobisnis dan agroindustri, fasilitas pengembangan sosial budaya, serta sarana prasarana intra maupun antar kawasan.

Peningkatan sentra agrobisnis dan agroindustri ini diharapkan dapat menarik investasi swasta dan menumbuhkembangkan wirausaha baru. Selain itu juga membuka kesempatan kerja dan peluang usaha di kawasan transmigrasi.**)



BPIW Kawal *Integrated Tourism* Masterplan di 3 KSPN

Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 20 juta turis asing pada tahun 2019 mendatang. Untuk mencapai target tersebut pemerintah memprioritaskan pengembangan 10 dari 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kesepuluh KSPN tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Laboan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara). Dari 10 KSPN tersebut, 3 diantaranya mendapatkan loan atau pinjaman dari World Bank atau Bank Dunia yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR dipercaya pemerintah untuk mengawal proses lelang pembuatan *integrated tourism masterplan* atau rencana induk pariwisata yang terintegrasi atau terpadu.



Danau Toba Sumatera Utara

Sumber: Shutterstock



Pantai Mandalika, NTB

Sumber: Shutterstock

Pengembangan KSPN mendapat dukungan penuh dari Kementerian PUPR melalui perencanaan yang dibuat BPIW. Perencanaan infrastruktur di kawasan pariwisata tersebut dilakukan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Hal itu dimaksudkan agar wilayah itu dapat berkembang menjadi wilayah yang kawasan pertumbuhannya saling terhubung satu sama lain. Dengan demikian dengan segala potensi yang ada, kedepan kawasan pariwisata dapat memiliki daya saing tinggi.

Dengan pendekatan WPS tersebut, menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan sejak 2015 lalu, Kementerian PUPR telah membangun infrastruktur di KSPN, salah satunya membuat akses jalan yang memperpendek jarak tempuh yang memudahkan wisatawan menuju destinasi wisata, seperti yang telah dilakukan di Danau Toba, Labuan Bajo, dan Morotai.

Dari 10 KSPN, pemerintah saat ini tengah memfokuskan pengembangan 3 KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Menurut Rido, untuk 3 KSPN tersebut, Kementerian PUPR telah memberikan dukungan infrastruktur.

Pada awalnya, beberapa instansi terkait, membuat *masterplan* pariwisata, terutama di 3 KSPN itu, berdasarkan versinya masing-masing. *Masterplan* yang dibuat, dianggap kurang terintegrasi, sehingga disepakati bahwa semua *masterplan* diintegrasikan atau disebut *integrated tourism masterplan*.

Pembuatan *masterplan* ini mendapatkan *loan* dari Bank Dunia.

"Jadi *masterplan* yang dibuat beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, perhubungan, dan pariwisata disatukan atau diintegrasikan. Saat ini baru 3 KSPN yang diintegrasikan yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Ketiganya dianggap bergerak cepat dan masing-masing sudah punya badan otoritanya," ujar Rido beberapa waktu yang lalu.

Menurut Rido, badan otorita tersebut sudah memiliki kepemilikan lahan, seperti Badan Otorita Danau Toba yang memiliki lahan seluas 600 hektar dan Borobudur memiliki 300 hektar. Sementara infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR selama ini, diluar kepemilikan lahan badan otorita tersebut.

Untuk 7 KSPN lainnya seperti Tanjung Lesung di Banten dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara, *masterplannya* juga akan diintegrasikan. "Kabarnya Australia juga mendukung 10 destinasi wisata yang disebut Bali Baru itu," ungkap Rido.

Saat ini, BPIW Kementerian PUPR dipercaya pemerintah dan juga kementerian/lembaga terkait untuk memproses paket lelang *integrated tourism masterplan* tersebut. Rido menilai kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang besar, dimana BPIW menjadi koordinator dalam memproses

Sejak 2015 lalu, Kementerian PUPR telah membangun infrastruktur di KSPN, salah satunya membuat akses jalan yang memperpendek jarak tempuh yang memudahkan wisatawan menuju destinasi wisata, seperti yang telah dilakukan di Danau Toba, Labuan Bajo, dan Morotai.

“Jadi *masterplan* yang dibuat beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, perhubungan, dan pariwisata disatukan atau diintegrasikan. Saat ini baru 3 KSPN yang diintegrasikan yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Ketiganya dianggap bergerak cepat dan masing-masing sudah punya badan otoritanya,” ujar Rido beberapa waktu yang lalu.

integrasi *masterplan* tersebut. “Bagi kita di BPIW, *integrated tourism masterplan* ini merupakan *pilot project*, karena pertama kali kita lakukan, dan bila kita sukses mengerjakannya, maka akan menjadi kepercayaan yang besar untuk mengerjakan 7 KSPN yang lainnya,” ucap Rido.

Meski BPIW yang mengkoordinasikan, namun menurut Rido yang menjadi *leader* pengembangan pariwisata, tetap berada di Kementerian Pariwisata. “Fungsi koordinator ini sangat penting dan bagian terbesar *masterplan* ini yang akan nanti diimplementasikan adalah infrastruktur PUPR,” tutur Rido.

Dengan bantuan konsultan yang terpilih nantinya, Rido berharap studi untuk membuat *masterplan* terintegrasi selama 12 bulan ini dapat segera dimulai. Selain itu studi tersebut diharapkan menjadi program yang terukur dan membuat nilai tambah bagi kawasan – kawasan yang ada di destinasi wisata itu. “Integrasi *masterplan* pariwisata ini juga membuktikan bahwa program pembangunan infrastruktur PUPR dapat disinkronkan dengan program pembangunan pariwisata dan dapat mendukung peningkatan devisa negara,” tegas Rido.

Pada pengembangan kawasan Danau Toba, beberapa pembangunan infrastruktur PUPR yang dilakukan seperti proses pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang ditargetkan selesai pada 2017.

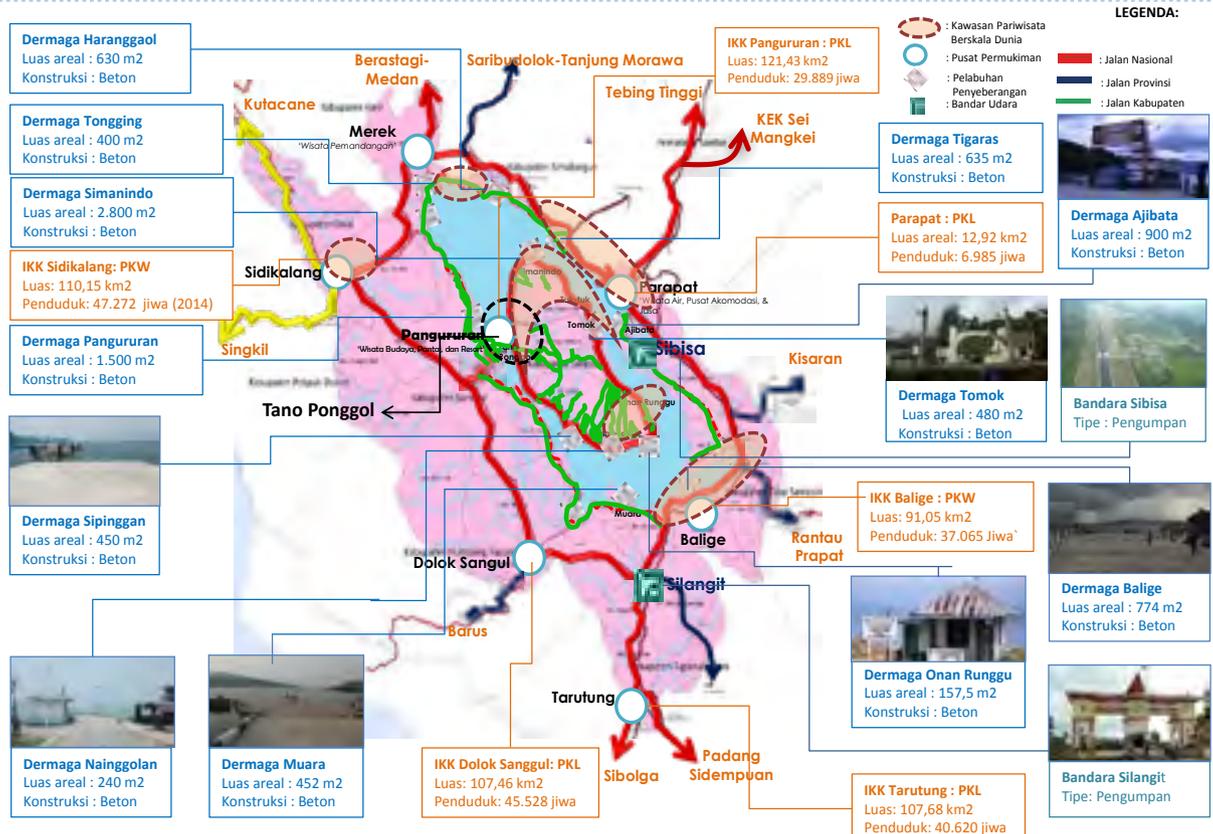
Sedangkan untuk pengembangan kawasan Borobudur, dukungan infrastruktur PUPR seperti pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen yang akan rampung pada 2019. Rido juga mengatakan dukungan infrastruktur PUPR di kawasan Mandalika, seperti pembangunan Jalan Gerung menuju Mataram sepanjang 2 km dan beberapa peningkatan kualitas kawasan kumuh di sekitar Mandalika.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi Sucahyono menambahkan, bahwa sebenarnya pembuatan *integrated tourism masterplan* bukan tugas pokok BPIW, karena BPIW biasanya menangani *masterplan* untuk infrastruktur PUPR saja. “BPIW mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk memproses *integrated tourism masterplan*. Hal ini merupakan sebuah penghargaan bagi kita di BPIW,” ujar Hadi.

Dalam melakukan proses lelang tersebut menurut Hadi, instansinya melakukan koordinasi dengan Bank Dunia. Koordinasi juga dilakukan dengan instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Pariwisata, Kemenko Maritim, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Proses lelang yang diikuti sekitar 28 perusahaan penyedia jasa dari dalam dan luar negeri ini disebut *International Competitive Bidding* atau persaingan penawaran internasional.

“Salah satu persyaratan dalam mengikuti *International Competitive Bidding* ini adalah harus memiliki pengalaman, setidaknya di dua negara. Hal

PROFIL DESTINASI WISATA DANAU TOBA





Candi Borobudur, Jawa Tengah

Sumber: Shutterstock

ini agar *integrated tourism masterplan* yang dibuat nantinya, benar-benar berkualitas internasional,” tegas Hadi.

Dikatakannya bahwa kunci dalam mengoptimalkan pengembangan sebuah destinasi wisata adalah 3A, yakni Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas. Dijabarkannya bahwa untuk “A” yang pertama, yakni “Atraksi” berarti kawasan wisata tersebut memiliki sesuatu yang menjadi daya tarik, misalnya tarian maupun prosesi adat istiadat. Kemudian “A” yang kedua adalah “Aksesibilitas” atau sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan ke destinasi pariwisata. Sedangkan “A” yang ketiga adalah “Amenitas” atau fasilitas lain seperti toko kerajinan tangan khas daerah.

“Jadi yang direkomendasi dalam *integrated tourism masterplan* nanti adalah di mana dan apa kebutuhan daerah untuk mempromosikan pariwisata diluar infrastruktur. Misalnya pusat kerajinan Danau Toba dan tempat aktraksinya berada di mana. Itu harus jelas,” tegas Hadi.

Dari 28 perusahaan yang ikut lelang tersebut, sudah ada 6 perusahaan yang dianggap memenuhi syarat yang ditetapkan Bank Dunia. Diantara 6 perusahaan itu ada juga yang berasal dari dalam negeri. Daftar 6 perusahaan ini disebut *short list* yang telah diajukan ke Bank Dunia untuk mendapatkan *No Objection Letter* (NOL) atau surat persetujuan. Bank Dunia mengeluarkan NOL bila 6 perusahaan penyedia jasa tersebut telah dianggap

memenuhi syarat untuk memasukkan proposal untuk pembuatan *integrated tourism masterplan* atau rencana induk pariwisata terintegrasi dengan bantuan dana dari Bank Dunia itu.

“Perusahaan-perusahaan tersebut layak diundang Bank Dunia untuk memasukkan proposal. Saat mereka ikut proses lelang, proposal belum disertakan, namun dilihat dulu syarat administrasinya, misalnya apakah mereka ada tenaga ahli jalan dan apakah sudah berpengalaman di dua negara,” ungkap Hadi.

Setelah surat NOL itu dikeluarkan Bank Dunia, maka BPIW mengundang 6 perusahaan ini, untuk memasukkan proposal teknis dan biaya.

Selain itu menurut Hadi, juga ditandatangani dokumen *loan agreement* (perjanjian pinjaman) dan *grand agreement* antara Bank Dunia dengan Menteri Keuangan. “Mereka (Bank Dunia, red) akan menandatangani itu setelah kita menyelesaikan dokumen *environment and social management frame work* atau kerangka kerja lingkungan dan manajemen sosial. Dokumen tersebut sudah kita selesaikan dan kita telah melakukan survei untuk menyelesaikannya,” ucap Hadi.

Menurut Hadi, sebagaimana kesepakatan sebelumnya, Bank Dunia telah menyanggupi membiayai pembuatan *masterplan* dan juga proyek fisik di 3 kawasan pariwisata itu. Dikatakannya juga bahwa ada 4 paket pekerjaan yang akan dikerjakan oleh 4 perusahaan konsultan. Untuk 3 paket itu

“Bagi kita di BPIW, *integrated tourism masterplan* ini merupakan *pilot project*, karena pertama kali kita lakukan, dan bila kita sukses mengerjakannya, maka akan menjadi kepercayaan yang besar untuk mengerjakan 7 KSPN yang lainnya,” ucap Rido.

PETA ORIENTASI CAKUPAN KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR

Cakupan kawasan pariwisata Borobudur meliputi:

1. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Nasional Solo-Sangiran dan sekitarnya; dan Destinasi Pariwisata Nasional Semarang-Karimun Jawa dan sekitarnya (PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Riparnas 2010-2025);
2. Kawasan Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya
3. Kawasan Otoritatif berada di luar deliniasi Kawasan Borobudur seluas 300 hektar



dilakukan di 3 destinasi wisata tersebut. Kemudian ditambah 1 paket untuk *managemen support*. Bank Dunia juga akan membantu pendanaan proyek fisiknya.

Menurut Hadi *management support* ini untuk mendukung secara administrasi tidak hanya untuk 3 KSPN, tapi juga 7 KSPN lainnya. “Jadi kan ada 10 KSPN yang merupakan destinasi prioritas. Dari 10 KSPN itu, 3 KSPN dilakukan *integrated tourism masterplan*, dan untuk 7 KSPN kita lihat apa yang dibutuhkan disana,” ujarnya.

Dipilihnya 3 KSPN yang diprioritaskan untuk mendapatkan *loan* Bank Dunia, kata Hadi dilandaskan data yang menunjukkan bahwa angka kunjungan wisatawan turis asing yang datang cukup banyak dan punya potensi untuk dikembangkan.

Selain itu juga disebabkan anggaran yang disediakan Bank Dunia terbatas, sehingga hanya 3 KSPN tersebut yang mendapatkan *loan*. Sedangkan untuk 7 KSPN direncanakan juga akan dibuatkan *integrated tourism masterplan* dengan pembiayaan dari APBN tahun depan.

Ketiga destinasi wisata tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Pertama, kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berada di Pulau Lombok, yang unggul sebagai kawasan maritim. Mandalika merupakan satu dari 4 destinasi wisata utama di pulau tersebut. Selain Mandalika sebagai kawasan wisata, juga ada Kepulauan Gili, Pantai Senggigi, dan Taman Nasional Rinjani

Pulau Lombok memiliki populasi sekitar 3,3 juta penduduk dengan luas pulau mencapai 4.379 km².

Daya tarik wisata di Pulau Lombok, khususnya di Kepulauan Gili dan Senggigi adalah wisata bahari, seperti pantai dan keindahan bawah laut untuk wisatawan yang ingin menyelam. Saat ini sedang dilakukan pembangunan hotel skala besar oleh Indonesia *Tourism Development Corporation* (ITDC) di Mandalika.

Destinasi wisata kedua, Danau Toba yang disebut sebagai Supervolcano Geopark. Pada awalnya, tahun 2011 nama *geopark* (sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi) diusulkan dengan nama Geopark Toba. Namun mengingat bahwa yang bernilai warisan dunia adalah peninggalan dari letusan *super volcano* Toba yang berdampak global berupa Danau Toba yang tiada lain adalah suatu Kaldera Kuarter terbesar di dunia, maka diusulkan nama *geopark*, menjadi *Geopark* Kaldera Toba sejak 2013.

Danu Toba mencakup kawasan Danau Toba dan sekitarnya, sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No.81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Ada 3 kawasan prioritas di Danau Toba, yakni pertama, Parapat (Kec. Girsang Sipangan Bolon) sebagai pintu utama menuju Pulau Samosir, sekaligus fokus pengembangan infrastruktur wisata.

Prioritas kedua di sekitar Danau Toba adalah Pulau Samosir, khususnya Kecamatan Simanindo dan Pangururan (desa wisata) memiliki atraksi seperti Kursi Batu Raja Siallagan dan Makam Raja Sidabutar.

Selain itu terdapat Desa Ambarita yang memiliki budaya adat Batak yang kental, Pantai Parbaba,

“Salah satu persyaratan dalam mengikuti *International Competitive Bidding* ini adalah harus memiliki pengalaman, setidaknya di dua negara. Hal ini agar *integrated tourism masterplan* yang dibuat nantinya, harus benar-benar berkualitas internasional,” tegas Hadi.

Pemandian Air Panas di Gubung Gunung Pusuk Buhit, dan desa wisata Tuktuk. Prioritas ketiga yakni Kecamatan Balige, dimana terdapat Bandara Silangit, yang merupakan bandara terdekat menuju ke Danau Toba. Selanjutnya ada museum yang menawarkan beragam model arsitektur Batak.

Destinasi wisata yang ketiga adalah Candi Borobudur yang disebut sebagai Mahakarya Arsitektur atau sebagai kawasan konservasi. Kawasan Borobudur dan sekitarnya, direncanakan akan dikembangkan dengan visi "The Capital Buddhist Heritage in The World".

Ada 3 atraksi utama di kawasan ini, yaitu pertama, Kawasan Borobudur, termasuk Candi Borobudur sebagai UNESCO World Heritage Site, Candi Pawon dan Candi Mendut, serta desa-desa adat di sekitarnya.

Atraksi kedua di kawasan Borobudur ini adalah Candi Prambanan dan Ratu Boko (UNESCO World Heritage Site), Candi Sewu, Candi Bubrah dan Candi Lumbung. Kemudian antraksi ketiga yakni Yogyakarta dengan atraksi utama Kraton Kesultanan Yogyakarta sekaligus Museum, Taman Sari, dan Kawasan Wisata Belanja Malioboro.

Menangani lelang internasional, bagi Hadi merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi BPIW. Pasalnya selama ini BPIW terutama Pusat Pengembangan Kawasan Strategis menangani masterplan dan development plan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Baginya, ada 3 perbedaan penanganan lelang saat ini dengan sebelum-belumnya. Pertama, dengan adanya Bank Dunia, maka lelang yang dilakukan

merupakan lelang internasional, sedangkan sebelumnya lelang biasa yang didanai APBN. Perbedaan kedua adalah perbedaan lingkup. Bila sebelumnya masterplan hanya terkait infrastruktur PUPR saja, namun kini tidak hanya menyangkut infrastruktur sektor PUPR tapi juga sektor lain, seperti pariwisata.

Kemudian perbedaan yang ketiga menurut Hadi adalah segi pendekatannya. Bila sebelumnya, yang ditangani Pusat Pengembangan Kawasan Strategis mengumpulkan data-data teknis seperti cakupan air dan jaringan jalan. Namun kini cakupannya tidak hanya masalah teknis, tapi juga lingkungan dan sosial. "Oleh karenanya kita sudah menyelesaikan kerangka kerja lingkungan dan manajemen sosial yang dimintakan Bank Dunia," ungkap Hadi.

Dengan adanya integrated tourism master plan ini, maka master plan yang telah dibuat BPIW melalui pendekatan WPS yang bersentuhan dengan 3 KSPN itu menurut Hadi menjadi masukan dalam pembuatan integrated tourism masterplan, termasuk juga masukan dari instansi lain seperti Kementerian Pariwisata dan Bappenas. Lelang itu juga diharapkan dapat menghasilkan masterplan pariwisata yang berkualitas internasional. Ia berharap integrated tourism masterplan secara terpadu di destinasi pariwisata prioritas ini dapat menjadi contoh untuk destinasi pariwisata lainnya.

Tim redaksi

Menurut Hadi, sebagaimana kesepakatan sebelumnya, Bank Dunia telah menyanggupi membiayai pembuatan masterplan dan juga proyek fisik di 3 kawasan pariwisata itu.

LOKASI PENYUSUNAN INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN

MARITIM	SUPERVELEKANO GEOPARK	MAHAKARYA ARSITEKTUR (BOROBUDUR)
 <p>Pulau Lombok mencakup 4 (empat) destinasi wisata utama, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepulauan Gili 2. Pantai Senggigi 3. KEK Mandalika 4. Taman Nasional Rinjani <p>Pulau Lombok memiliki populasi penduduk sekitar 3,3 juta penduduk dengan luas pulau 4.379 km². Daya tarik wisata di Pulau Lombok, khususnya di Kepulauan Gili dan Senggigi adalah wisata bahari, seperti pantai dan tujuan untuk menyelam. Saat ini sedang dilakukan pembangunan hotel skala besar oleh (Indonesian Tourism Development Corporation) di Mandalika.</p>	 <p>Danau Toba mencakup kawasan Danau Toba dan sekitarnya (Perpres No.81 Tahun 2014). Terdapat 3 (tiga) kawasan prioritas, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panapat (Kec. Girsang Sipangan Bolon) sebagai pintu utama menuju Pulau Samosir, sekaligus fokus pengembangan infrastruktur wisata. 2. Pulau Samosir, khususnya Kecamatan Simanindo dan Pangururan (desa wisata) memiliki atraksi seperti Kuri Batu Raja Salagan dan Makam Raja Sidibutar. Selain itu terdapat Desa Amberita yang memiliki budaya adat Batak yang kental, Pantai Paribata, Pemandian Air Panas di Gubung Gunung Pusuk Buhit, dan desa wisata Tuktuk. 3. Kecamatan Balige, Terdapat Bandara Silangit, Bandara terdekat menuju ke Danau Toba. Selain itu terdapat Museum yang menawarkan beragam model arsitektur Batak. 	 <p>Kawasan Borobudur dan sekitarnya, direncanakan dengan visi "The Capital Buddhist Heritage in The World" memiliki 3 atraksi utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Borobudur, termasuk Candi Borobudur sebagai UNESCO World Heritage Site, Candi Pawon dan Candi Mendut, serta desa-desa adat di sekitarnya. 2. Candi Prambanan dan Ratu Boko (UNESCO World Heritage Site), Candi Sewu, Candi Bubrah dan Candi Lumbung. 3. Yogyakarta dengan atraksi utama Kraton Kesultanan Yogyakarta sekaligus museum, Taman Sari, dan Kawasan Wisata Belanja Malioboro.

Sumber: PUPR



Mewujudkan Pembangunan Kota yang Optimum, Efisien dan Mandiri

Dalam buku ini, Rahardjo Adisasmita menerangkan beberapa hal, seperti sejarah perkotaan. Disampaikannya bahwa di abad pertengahan, kota terbentuk sebagai persinggahan dari perjalanan yang jauh. Kemudian kota dimanfaatkan sebagai tempat tukar menukar barang dagangan. Dari tempat persinggahan, kota menjadi pasar yang berkembang ramai sebagai embrio terbentuknya kota-kota kecil. Kota-kota kecil pun akhirnya berkembang menjadi kota menengah dan kota besar.

Perkembangan kota terjadi dikarenakan adanya peluang terjadinya efisiensi dalam kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan pemasaran, transportasi, dan kerajinan. Kemudian, kota dapat berkembang lebih efisien lagi dengan meluasnya fungsi sebagai pusat perdagangan, transportasi, multi industri pengolahan, pelayanan pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan perbankan, serta jasa konstruksi. Kota juga sebagai pusat pelayanan pemerintahan umum dan pembangunan untuk melayani kebutuhan penduduk.

Pemerintah kota bertugas membangun prasarana dan sarana perkotaan, serta fasilitas ekonomi dan sosial. Jika kegiatan ekonomi perkotaan berkembang, maka penyelenggaraan pelayanan umum perkotaan (*public services*) harus diupayakan seefisien mungkin. Kota yang efisien memberikan dampak kesejahteraan penduduknya. Kegiatan ekonomi dan pelayanan umum perkotaan yang efisien akan meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perkotaan secara lebih intensif dan berkelanjutan.

Dalam rangka membangun kota yang efisien, ada dua hal yang harus dikedepankan, yaitu: efisiensi pelayanan publik untuk mendorong pengembangan berbagai kegiatan ekonomi perkotaan, keduanya berkaitan erat dan diberikan perhatian secara proporsional. Pembangunan kota yang efisien sangat luas aspeknya, dalam buku ini akan dibahas beberapa topik utama, yaitu:

1. Peran dan fungsi kota dalam pembangunan wilayah
2. Interaksi antara pusat kota dengan wilayah sekitarnya
3. Urbanisasi di berbagai kota besar di Asia
4. Beberapa konsep Kota
5. Teori pertumbuhan kota dan struktur kota: *central place and urban base*
6. Teori pembangunan polarisasi
7. Teori ambang batas untuk perencanaan kota dan regional
8. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
9. Perumahan dan permukiman perkotaan
10. Lingkungan hidup di perkotaan
11. Pengelolaan jasa pelayanan umum
12. Perencanaan dan manajemen strategis dalam pembangunan perkotaan
13. Strategi nasional pembangunan perkotaan jangka panjang
14. Perencanaan anggaran daerah, manajemen keuangan daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah
15. Pembangunan kota optimum dan mandiri

Membangun sebuah kota bukan seperti membangun istana pasir. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Buku ini membahas bagaimana sebuah kota menjadi kota yang optimum, mandiri, dan efisien. **(Mutri/infobpiw)**

Judul Buku : Pembangunan Kota Optimum,
Efisien dan Mandiri
Pengarang : Rahardjo Adisasmita
Penerbit : Graha Ilmu
Tahun Terbit : 2010
Jumlah Halaman : 202 halaman

“Membangun sebuah kota bukan seperti membangun istana pasir. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Buku ini membahas bagaimana sebuah kota menjadi kota yang optimum, mandiri, dan efisien.”



Istilah Tentang Pariwisata

Pemerintah saat ini sedang memfokuskan pada pengembangan kawasan pariwisata. Ditargetkan pada 2019 mendatang, angka kunjungan wisatawan mancanegara dapat mencapai 20 juta jiwa. Sehubungan dengan hal itu, berikut informasi mengenai beberapa istilah tentang pariwisata.

Pariwisata: berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pariwisata alam: Berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan, berhubungan dengan gejala keunikan dan keindahan alam, di taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pariwisata bahari: Berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan, berhubungan dengan wisata pesisir, laut, dan isinya.

Pariwisata ekologis: Berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan, berhubungan dengan lingkungan ekosistem

Kepariwisataan: Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata, bersifat multidimensi dan multidisipliner yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Sumber: Kamus Penataan Ruang

Peran BPIW Sangat Vital Dalam Mendukung Aksesibilitas Kawasan Pariwisata

Hiramsyah S. Thaib

Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata

Pemerintah saat ini terus melakukan pembangunan di segala sektor. Salah satunya sektor pariwisata yang ditargetkan dapat mencapai 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut adalah membentuk Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Kepada 'Buletin Sinergi', Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10

Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata, Hiramshyah S. Thaib berbicara beberapa hal seperti program yang dijalankan tim ini. Selain itu ia juga menilai peran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR sangat vital, terutama dalam membuat program infrastruktur PUPR dalam mendukung terbangunnya aksesibilitas darat, terutama jalan raya. Untuk lebih jelasnya, simak wawancara lengkapnya berikut ini.

Pemerintah menargetkan pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara 20 juta di tahun 2019. Apa yang melatarbelakangi target tersebut?

Target kunjungan wisatawan mancanegara ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi, dimana sektor pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang paling mudah dan murah untuk dikembangkan. Apalagi Presiden telah menetapkan bahwa pariwisata sebagai sektor prioritas dan unggulan yang diperkirakan atau diproyeksikan akan menjadi penghasil devisa nomor satu di tahun 2019 mendatang.

Pariwisata disebut sebagai sektor yang paling mudah dan murah, karena atraksi atau daya tarik wisatanya sudah ada dan tersedia. Bila daya tarik wisatanya sudah ada, maka isu utama pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata adalah aksesibilitas dan manajemen. Dengan manajemen yang baik, terbukti bahwa sektor pariwisata tumbuh di atas rata-rata dibandingkan sektor lainnya, bahkan pada semester 1, pariwisata mampu tumbuh sebesar 23%.

Dari 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pemerintah memfokuskan pada 10 KSPN. Bisa dijelaskan, apa saja 10 KSPN itu, dan apa yang menjadi alasan pemerintah mengembangkan 10 KSPN?

Jadi 10 KSPN di 10 destinasi pariwisata prioritas, terdiri dari Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kota Tua dan Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Borobudur di Magelang, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Lombok, Labuan Bajo di NTT,

Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara. Pemilihan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas ini mempertimbangkan potensi pariwisata, kesiapan masyarakat, dan *support* pemerintah daerahnya.

Dari 10 KSPN, pemerintah memfokuskan pada 3 KSPN yang mendapatkan *loan* dari World Bank. Apa yang membedakan penanganan 3 KSPN itu dengan 7 KSPN lainnya?

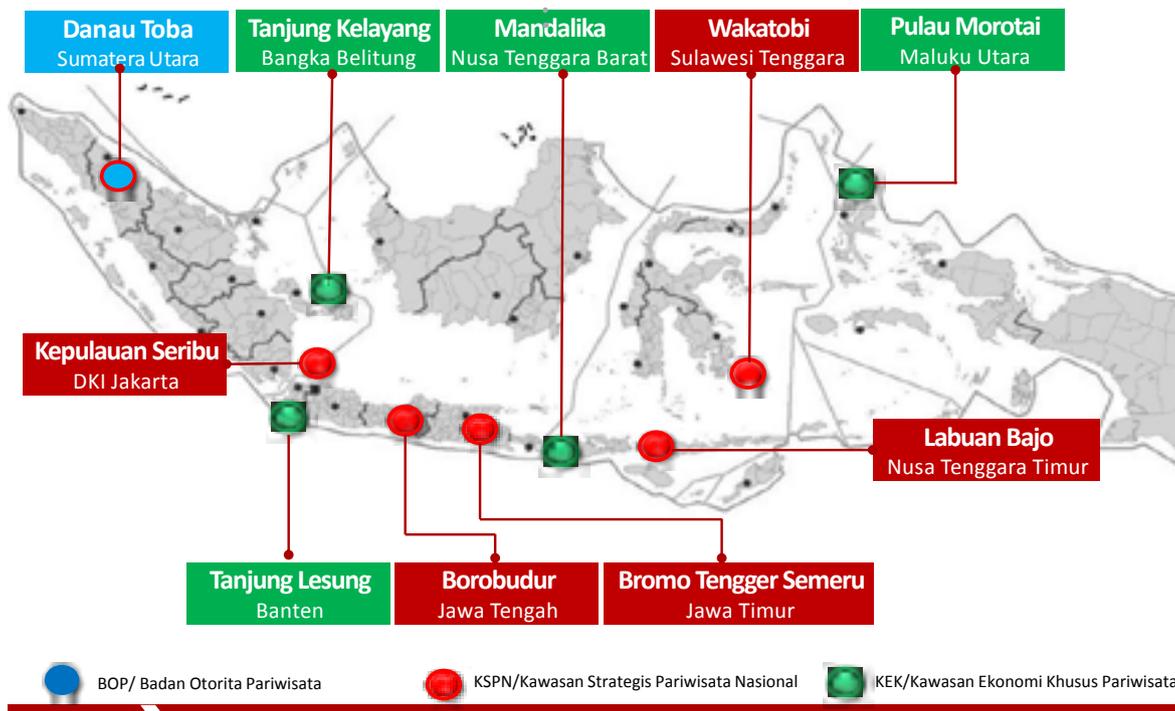
Penanganan destinasi pariwisata prioritas itu, tidak terlepas dengan adanya keterbatasan sumber dana. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, dengan memilih 3 dari 10 destinasi untuk dikembangkan melalui dukungan pendanaan dari World Bank, yaitu, Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur. Pemerintah tetap mengembangkan 7 KSPN lainnya dengan dana APBN serta pendanaan lain seperti dari Kementerian Pariwisata.

Seperti apa konsep Kementerian Pariwisata dalam mempercepat pembangunan 10 destinasi wisata tersebut?

Konsep Kementerian Pariwisata terdiri dari program 3A yang merupakan *key success factors* atau faktor kunci keberhasilan untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Program 3 A itu adalah atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Atraksi merupakan daya tarik di destinasi pariwisata yang menarik minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut. Sedangkan aksesibilitas adalah sarana dan prasarana untuk menuju ke destinasi pariwisata. Sementara amenitas adalah fasilitas pendukung yang disediakan di destinasi pariwisata, seperti *homestay* dan hotel.

“Pariwisata disebut sebagai sektor yang paling mudah dan murah, karena atraksi atau daya tarik wisatanya sudah ada dan tersedia. Bila daya tarik wisatanya sudah ada, maka isu utama pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata adalah aksesibilitas dan manajemen”.

LOKASI 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS



STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA



Bagaimana tugas dan wewenang dari tim percepatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas kementerian pariwisata?

Tugas dari tim percepatan pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata ada 6. Pertama, melakukan identifikasi 3A tadi, yakni *Strategid Situation Analysis, Benchmarking* dan *Key Success Factor*. Kedua, melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan atau *development plan* dari masing-masing sektor dan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pariwisata nasional.

Tugas tim percepatan yang ketiga adalah menyusun program dan kegiatan 2017-2019 terkait kebutuhan dukungan lintas sektor pada hal-hal yang berhubungan dengan atraksi wisata, aksesibilitas dan amenities.

Tugas keempat yakni, menyusun *business plan* yang mencakup evaluasi ekonomi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi di 10 destinasi pariwisata prioritas termasuk pola dan organisasi tata kelola/kelembagaan.

Kelima, memastikan pelaksanaan pembangunan fasilitas infrastruktur dan pelayanan dengan menerapkan fungsi sistem integrator dan *project management* di destinasi pariwisata prioritas. Tugas tim yang keenam adalah memberikan evaluasi, rekomendasi dan masukan yang diperlukan.

Apa saja program dan langkah percepatan yang disiapkan Kementerian Pariwisata?

Program dan langkah percepatan yang disiapkan Kementerian Pariwisata berupa koordinasi dengan Kementerian/Lembaga maupun pihak lain untuk pengembangan 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenities.

Apa tantangan dan kendala yang Bapak hadapi dalam mengawal percepatan pembangunan 10 kawasan wisata?

Tantangan dan kendala yang dihadapi, pertama adalah egosentris. Tantangan kedua adalah status kelompok kerja percepatan 10 destinasi pariwisata prioritas adalah *ad hoc* dan non struktural, sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan banyak menghadapi hambatan implementasi di lapangan.

Status tersebut berimplikasi terhadap terbatasnya dukungan sumber daya dan sumber dana yakni APBN, padahal ekspektasi terhadap kinerja tim percepatan sangat besar.

Apa yang melatarbelakangi dibentuknya Badan Otorita terkait pariwisata?

Sebelumnya, satu destinasi memiliki banyak pengurus, sehingga menyulitkan koordinasi. Sedangkan saat *benchmark* ke destinasi lain, semuanya menerapkan sistem *single destination* dan *single management*. Sehingga Badan Otorita dibentuk sebagai usaha mempercepat pembangunan dan pengembangan destinasi.

Bagaimana koordinasinya dengan Kementerian PUPR, terutama dengan BPIW terkait pengembangan destinasi wisata di tanah air?

Koordinasi yang kita lakukan dengan Kementerian PUPR dalam bentuk rapat reguler, dan kita lakukan secara rutin, seminggu sekali.

Dukungan seperti apa yang dibutuhkan Kementerian Pariwisata terhadap Kementerian PUPR untuk meningkatkan kunjungan jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia?

Dukungan yang kita butuhkan dari Kementerian PUPR seperti penyediaan aksesibilitas dan amenities destinasi pariwisata. Khusus terkait amenities kita perlu mensinkronkan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS). Program ini berada di Ditjen Penyediaan Perumahan. Dukungan lain dari Kementerian PUPR seperti program bantuan perumahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai

“Program dan langkah percepatan yang disiapkan Kementerian Pariwisata berupa koordinasi dengan Kementerian/Lembaga maupun pihak lain untuk pengembangan 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenities”.

Homestay Nusantara dengan mempertahankan arsitektur nusantara.

Secara spesifik untuk mensinkronisasi program tersebut perlu diadakan tinjauan lapangan dan kajian bersama dalam menentukan lokus atau tempat penerima bantuan. Kemudian, memastikan implementasi berjalan sesuai regulasi yang mendukung arsitektur nusantara.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), termasuk juga dalam kaitannya dengan dukungan terhadap kawasan wisata. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini?

Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai unggulan/prioritas sehingga pembangunan sektor pariwisata sudah menjadi tugas semua Kementerian/Lembaga. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata menjadi tugas seluruh Kementerian/Lembaga. Sehingga peran Kementerian PUPR sangat penting, dalam membangun akses jalan, misalnya menuju destinasi wisata.

Terkait kerja sama tersebut, saya melihat Kementerian PUPR sangat komit dalam mendukung sektor pariwisata sesuai arahan Presiden.

Namun masih ada pekerjaan rumah yang perlu dilakukan. Pekerjaan rumahnya pertama, sinkronisasi program kerja dengan Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian PUPR. Kedua, secara spesifik harus dipastikan dukungan pembangunan infrastruktur berupa tol dan jalan raya untuk mendukung 10 destinasi pariwisata prioritas serta integrasi *masterplan*.

Saya bersyukur, karena Kementerian PUPR, khususnya BPIW, sangat *support* dalam mendukung

pembangunan infrastruktur sebagai suatu aksesibilitas destinasi pariwisata prioritas, sehingga masalah infrastruktur seperti akses jalan raya, punya *progress* yang sangat cepat.

Apa harapan Bapak terhadap Kementerian PUPR termasuk BPIW dalam hal pengembangan infrastruktur di kawasan pariwisata?

Harapan saya, terutama terkait 'A' yang kedua dari prinsip 3A dalam pengembangan infrastruktur di kawasan pariwisata, yakni aksesibilitas. Aksesibilitas sangat berperan besar dalam pengembangan pariwisata dan merupakan masalah utama dan menjadi agenda penting kita.

Oleh karenanya, peran BPIW sangat vital dalam membuat program pembangunan infrastruktur PUPR dalam mendukung terbangunnya aksesibilitas darat, terutama jalan raya, sehingga kualitas konektivitas kita mampu disejajarkan dengan destinasi wisata berkelas dunia lainnya.

Satu pekerjaan rumah yang sangat vital dan strategis adalah membuat *integrated tourism masterplan* yang menjadi acuan untuk perencanaan dan pembangunan seluruh aspek kawasan pariwisata.

Integrated tourism masterplan tersebut, saat ini sudah mulai dikerjakan oleh BPIW bersama Kementerian Pariwisata dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Pembuatan *Integrated tourism masterplan* dimulai untuk 3 destinasi, yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika dengan dukungan dana dari World Bank, yang nantinya diharapkan menjadi model untuk destinasi prioritas lainnya.

“Peran BPIW sangat vital dalam membuat program pembangunan infrastruktur PUPR dalam mendukung terbangunnya aksesibilitas darat, terutama jalan raya, sehingga kualitas konektivitas kita mampu disejajarkan dengan destinasi wisata berkelas dunia lainnya”.



Keakraban Hiramshyah S.Thaiib dengan jajaran pimpinan BPIW

Sumber: Dok. BPIW

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Redaksi Buletin Sinergi mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut disarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah 2 potongan pemberitaan tersebut dan ulasannya.



Kota Baru Harus Inklusif

Utamakan Kepentingan Publik secara Luas

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan kota baru di sejumlah daerah harus inklusif dan mengakomodasi kepentingan publik secara luas. Karena itu, pengembangannya harus melalui konsultasi publik dan selanjutnya diikat dalam peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kota baru jangan hanya jadi obyek mainan pengembang,

ralat.

"Sapa membayar, sapa mendapat kesentingan dalam suatu kota? Saat ini tidak jelas, siapa membantu siapa. Sering kali yang direncanakan tidak terjadi dan yang tidak direncanakan malah terjadi," ujar Dharmaadin.

Masih gagap

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Didin Samudlin mengatakan, sebagian wilayah Kabupaten Tangerang kini berkembang menjadi beberapa kota baru yang diinisiasi sejak 1993. Ia akui, pemerintah kabupaten terganggu ketika ada rencana pengembangan kota baru oleh pengembang.

"Pengembang selalu lebih cepat. Akhirnya kami menyusun rencana detail tata ruang bersama pengembang. Misalnya, ada pengembang yang ingin membangun apartemen, kami sempat bingung karena belum ada aturannya, akhirnya mendapat kawasan dibuat bersama-sama, kemudian disahkan," kata Didin.

Didin juga mengakui, kota baru yang terbentuk tidak saling terkait satu sama lain dan juga dengan kawasan di sekitarnya. Akibatnya, banyak masalah muncul dan tidak terantisipasi, terutama air bersih dan sanitasi.

"Bayangkan, dari 29 kecamatan, kami hanya punya satu instalasi pengolahan limbah tinja. Akibatnya, banyak pihak buang limbah ke sungai, pencemaran tak terhindarkan," katanya.

Mary Octa Sibumbang dari Bidang Pengembangan Kota Mandiri dan Perumahan Kota Real Estate Indonesia mengatakan, Indonesia sudah 800.000 unit rumah per tahun. Kemampuan pengembang 300.000-400.000 rumah. "Daya beli jadi soal. Banyak orang memilih rumah tapak ketimbang hunian vertikal, padahal harga tanah, terutama setelah ada rencana pembangunan infrastruktur, langsung melonjak," ujarnya. (UTU)

Dalam diskusi bertema "Kota Baru: Dominasi Pasar vs Kebutuhan Publik" di Universitas Tarumanagara, Sabtu (26/8), terungkap, pemerintah sejak 2015 hingga 2019 mengembangkan 14 kota baru di Indonesia. Kota baru itu berlokasi di Sumatera Utara hingga Papua. Di sekitar Jakarta antara lain di Maja, Banten, dan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Prinsipnya, dalam prosesnya kita coba seinklusif mungkin. Seluruh tahapan dilalui mulai dari pemetaan potensi hingga pemetaan masalah. Ini yang membedakan pengembangan kota baru publik dengan yang dilakuk oleh swasta. Harus melalui konsultasi publik, pembatasan publik," ujar Agus Sutarito, Direktur Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Agus mengatakan, yang menjadi persoalan adalah ketika swasta berniat mengembangkan kota baru. Proses-proses seperti uji publik tidak dilalui karena penetapan rencananya tak mengikuti ketentuan UU.

Akibatnya, banyak kota baru, seperti 25 kota baru di Jabodetabek, akhirnya eksklusif, hanya bisa dijangkau kalangan menengah ke atas. Agus memastikan, untuk kota baru yang direncanakan pemerintah, negosiasi jada ketentuan dalam UU No 24/2007 tentang Tata Ruang yang acuan utamanya adalah kepentingan publik. Hal ini termasuk strategi untuk tetap konsisten menyiapkan penyediaan pasokan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rido Murti Ichwan mengatakan, kota baru yang direncanakan pemerintah dibangun atas kerja sama pemerintah dengan swasta. Swasta memiliki peranan lebih besar dengan catatan mengikuti kesepakatan, seperti pembangunan rumah MBR di luar Jawa dan harus berkelanjutan.

"Kami sudah siapkan masterplan dan development plan 10 kota baru publik. Infrastruktur dibangun berbasis pengembangan wilayah. Kami petakan yang paling strategis untuk dibangun infrastruktur," katanya.

Rido menyebutkan, dari 14 kota baru yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah dan yang merupakan inisiatif Kementerian PUPR, kota yang baru-baru baru adalah Maja. Maja sudah direncanakan sejak 2004 dan kini ada 121 pengembang yang terlibat dari sebelumnya hanya empat pengembang.

Di Kemayoran, kota Rido, Kementerian PUPR membangun 10 menara rumah susun yang nantinya diperuntukkan bagi MBR. Di Padang, kota baru dibuat untuk taban benasa dan Palembang akan dibuat kota olahraga.

Untuk 14 kota baru tersebut, kata Rido, pemerintah butuh dana Rp 1.226 triliun. Sekitar Rp 500 triliun dari APBN, sisanya belum ada solusi pembiayaan.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Bernhard Djocopudjro menyebutkan, banyak persoalan terjadi selama ini karena tidak ada keterkaitan antara perencanaan pemerintah, pengembang dan lembaga swadaya masyarakat.



Ulasan pertama Teropong Media edisi kali, terkait berita di harian Kompas pada tanggal 28 Agustus pada rubrik Metropolitan. Berita ini diberi judul "Kota Baru Harus Inklusif". Berikut ulasannya :

Semua Pihak Harus Berkomitmen Merealisasikan Kota Baru yang Inklusif

Pengembangan kota baru yang dilakukan pemerintah, harus bersifat inklusif bukan eksklusif. Hal ini dilakukan agar dapat mengakomodasi kepentingan publik secara luas. Pernyataan yang disampaikan Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Agus Sutanto, pada diskusi bertema "Kota Baru: Dominasi Pasar vs Kebutuhan Publik" di Universitas Tarumanegara, Sabtu (26/8) lalu itu, sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak.

Apalagi dalam Pasal 61 huruf d Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa "Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib : memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum".

Terkait hal itu, Kementerian PUPR selalu berkomitmen membangun infrastruktur dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan Kota Baru Maja. Pembangunan di daerah tersebut memiliki konsep hunian yang menyediakan rumah bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Hal itu selalu ditekankan kepada pihak pengembang swasta, agar pembangunan di sebuah kawasan tidak justru bersifat eksklusif tapi inklusif.

Dengan bersifat inklusif, maka tidak ada kawasan yang bersifat eksklusif (hanya dapat diakses kalangan tertentu). Pembangunan *public space* dan juga ruang terbuka hijau (RTH), misalnya, perlu diperbanyak, sehingga dapat menghilangkan kesan eksklusif suatu kawasan. Perlu komitmen dan langkah nyata dari semua pihak termasuk pemerintah daerah dalam merealisasikan hal tersebut.

Sementara terkait dukungan terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan, saat ini BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan tengah memfokuskan pada penyelesaian penyusunan Masterplan dan *Development Plan* di 4 kawasan Kota Baru yakni Palembang, Makassar, Manado, dan Sorong.

Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri terkait pengembangan Kota Baru dan Kawasan Perkotaan lainnya yang masuk dalam RPJMN 2015 – 2019.

Salah satu bentuk koordinasi tersebut menghasilkan pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional atau TKPPN yang dikoordinasikan oleh Bappenas untuk keterpaduan dan percepatan pembangunan perkotaan di Indonesia. BPIW Kementerian PUPR menjadi pengarah, dan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menjadi salah satu anggota dalam TKPPN tersebut.

Pembentukan tim ini, setidaknya dapat menjawab tantangan pembangunan perkotaan, dimana populasi penduduk perkotaan dalam 4 dekade (1970-2010) meningkat 6 kali lipat. Dengan membangun kawasan perkotaan yang dilakukan secara bersama-sama dari semua instansi terkait termasuk pihak swasta dan masyarakat, diharapkan juga dapat mengendalikan *urban sprawl* atau penyebaran penduduk perkotaan yang tidak terkendali.

▶ KOTA BARU MAJA

Satgas Khusus Diperlukan

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengusulkan agar dibentuk Satuan Tugas Khusus Kota Baru Publik Maja untuk memacu percepatan pengembangan yang terintegrasi.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Rido Matari Ichwan mengatakan, Kota Maja akan menjadi kota baru yang berkelanjutan dalam aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Proses pembangunannya bersinergi antara pemerintah, swasta (pengembang perumahan, industri, perdagangan) dan pemangku kepentingan lainnya seperti BUMN dan Perum Perumnas.

Pembangunan Kota Maja ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jabar, Banten, Kab./Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Lebak, Bogor.

"Hadirnya satgas khusus akan memudahkan dalam mewujudkan rencana aksi yang telah disusun untuk Kota Baru Publik Maja. Proses pembangunannya memperhatikan semua strata penghasilan rendah, menengah, maupun tinggi," ujar Rido, belum lama ini.

Kementerian PUPR senantiasa ber-

fokus untuk dapat mengembangkan Kota Baru Publik Maja. Pengembangan Maja, selain menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah juga akan memiliki kontribusi terhadap Program Sejuta Rumah untuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu cara yang diambil untuk mengembangkan Kota Baru Publik Maja yakni melakukan pembangunan jalan akses Maja.

"Saat ini penyediaan lahan serta hal yang terkait dengan pembangunan jalan, perizinan sudah ada solusi. Ke depan, tinggal realisasinya," kata Rido.

Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Dirjen Bina Marga Triono Junoasmono menuturkan, saat ini proses studi kelayakan akses jalan Maja sedang dilakukan oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VI dan dilanjutkan dengan penyusunan detail desain rekayasa atau detail engineering design yang ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.

"Ini sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam MoU (*memorandum of understanding*) yang ditandatangani oleh Menteri PUPR dengan pemerintah daerah dan para pengembang," ucapnya. *(Nanta Perlelu)*

Ulasan kedua Teropong Media edisi kali, terkait berita di harian Bisnis Indonesia pada tanggal 28 Agustus, yang diberi judul "Kota Baru Maja, Satgas Khusus Diperlukan". Berikut ulasannya :

Mewujudkan Hunian Untuk Masyarakat Miskin Lewat Satgas Khusus

Didalam berita yang ditulis pada rubrik "Infrastruktur" dan di halaman 28 ini, Bisnis Indonesia mengutip komentar Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan belum lama ini. Pada media itu Rido mengatakan bahwa Kementerian PUPR mengusulkan agar dibentuk satuan tugas (satgas) khusus kota baru publik Maja untuk memacu percepatan pengembangan terintegrasi.

Menurut Rido, hadirnya satgas khusus akan memudahkan dalam mewujudkan rencana aksi yang telah disusun untuk kota baru publik Maja. Apalagi pembangunan Maja berkontribusi terhadap program sejuta rumah untuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dikatakannya juga bahwa Kota Maja akan menjadi kota baru yang berkelanjutan dalam aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Usulan satgas khusus untuk kota baru yang berada di Provinsi Banten ini sangat diperlukan. Selain dapat memudahkan rencana aksi yang telah disusun, juga untuk memastikan bahwa pihak swasta atau pengembang benar-benar memberikan porsi hunian bagi masyarakat miskin (MBR). Konsep hunian berimbang yakni 1 : 2 : 3, dimana 3 untuk MBR, 2 untuk masyarakat berpendapatan sedang, dan 1 untuk masyarakat atas. Hunian berimbang ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tidak sekedar menunggu terbentuknya satgas khusus, BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat agar pelaksanaan hunian berimbang dapat terlaksana dengan baik. Koordinasi dilakukan, mengingat pemda merupakan pemberi izin lokasi dan izin membangun hunian.

Disisi lain, Kementerian PUPR juga mendukung hunian bagi MBR melalui pembangunan rusunawa, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain itu, kementerian ini juga memberi dukungan terkait sarana dan prasarana dasar seperti air minum, dan jalan lingkungan.



DAPATKAN BUKU

SINKRONISASI PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK 2018 - 2020 KETERPADUAN PENGEMBANGAN KAWASAN DENGAN INFRASTRUKTUR PUPR

DAPAT DIUNDUH DI
Google
Books



LANGKAH MENGUNDUH BUKU VIA WEBSITE:

1. Buka Link **Google** di www.books.google.com
2. Ketik "Sinkronisasi Program" pada kotak pencarian
3. Pilih Buku seperti diatas yang akan diunduh

LANGKAH MENGUNDUH BUKU VIA QR CODE:

1. Buka Aplikasi Scanner Barcode pada Smartphone
2. Scan Barcode diatas dan Pilih Open Link
3. Unduh Buku



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR



BIDANG
PENYUSUNAN PROGRAM

Kementerian PUPR Dukung infrastruktur di Karangasem melalui WPS 15

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali di Kantor BPIW, Jakarta, Jumat (25/8). Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa Kementerian PUPR melalui BPIW akan mendorong pengembangan infrastruktur PUPR di Karangasem melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 15 Gilimanuk-Denpasar-Padangbay.

Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu mengatakan, Kementerian PUPR saat ini melakukan pengembangan infrastruktur dasar dengan menerapkan metode berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

"Seluruh wilayah yang ada di negeri ini, semuanya terkelompokan dalam 35 WPS. Penerapan WPS ini dilakukan untuk mengidentifikasi wilayah strategis, yang dapat memberi efek berantai serta kondisi yang lebih baik terhadap wilayah-wilayah

sekitarnya," paparnya. Firman melanjutkan, dalam WPS itu terdapat sejumlah kawasan pengembangan dengan tema tertentu, seperti Kawasan Pertanian, Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata

"Dengan kawasan pariwisata yang berkembang di Karangasem akan tercipta banyak lapangan kerja, baik itu industri pariwisata ataupun jasa, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Firman.

Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kota Baru Publik Mandiri, dan lainnya.

BPIW, lanjutnya, memiliki tugas melakukan penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) untuk pengembangan infrastruktur. Selanjutnya, teknis perencanaan detail dan fisik pembangunan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi

teknis terkait di Kementerian PUPR. "Jadi untuk pembangunan jalan dilaksanakan oleh Dirjen Bina Marga, pemukiman oleh Dirjen Cipta Karya, perumahan oleh Dirjen Penyediaan Perumahan serta irigasi atau danau oleh Dirjen Sumber Daya Air," terang Firman.

Menurutnya, Karangasem masuk dalam WPS 15 ada potensi untuk pengembangan kawasan pariwisata dan pertanian. Ia berharap, pengembangan kawasan pariwisata dan pertanian akan banyak berdampak menurunkan tingkat kemiskinan warga sekitar.

"Dengan kawasan pariwisata yang berkembang di Karangasem akan tercipta banyak lapangan kerja, baik itu industri pariwisata ataupun jasa, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Firman.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penyusunan Program, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Sosilowati mengatakan, untuk periode 2015-2019



Firman H Napitupulu memberikan kenang-kenangan kepada pimpinan rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Karangasem, I Kadek Sujanayasa.

Sumber: Dok. BPIW

Kementerian PUPR telah melakukan beberapa perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di WPS 15.

“Seperti pada program sektor Bina Marga, antara lain pembangunan jalan *Western Ring Road* (WRR), peningkatan jembatan Teluk Biluk Poh, pelebaran jalan Denpasar-Tuban Tekad, pelebaran ruas jalan Cekik-Gilimanuk, pembangunan jalan Mengwitani-Singaraja, pembangunan jalan Pulau Nusa Penida serta pembangunan Flyover Ngurah Rai,” papar Sosilawati.

Adapun, lanjutnya, sektor Keciaptakarya ada program seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Linggasana Kabupaten Karangasem, pembangunan Instalasi Pengolahan air (IPA) Waribang, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sanih Kubutambahan Buleleng, pembangunan SPAM Sembung, SPAM Den Kayu Mengwi Kabupaten Badung serta SPAM Sarbagita. Untuk sektor Sumber Daya Air antara lain, ada pembangunan prasarana pengaman

pantai ruas Pantai Jasri di Kabupaten Karangasem, pembangunan Waduk Lumbuk, pembangunan Waduk Telagawaja, pembangunan Embung Batu Dawa II, pembangunan Bendungan Sidan Ayung 1, serta pembangunan prasarana pengaman pantai di Kabupaten Jembrana.

“DPRD terus mendorong pemerintah kabupaten menjajaki kerjasama dengan swasta, agar menanamkan modalnya untuk pembangunan di Karangasem,” ungkap Sujanayasa.

“Untuk sektor perumahan ada juga peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 2.000 unit, bantuan rumah swadaya sebanyak 2.000 unit serta pembangunan perumahan bersubsidi tersebar di beberapa lokasi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karangasem, I Kadek Sujanayasa menyatakan, kondisi saat ini pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karangasem terasa kurang bergeliat dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.

Dengan begitu, lanjutnya, DPRD Kabupaten Karangasem terus berupaya mencari peluang untuk dapat melakukan percepatan pengembangan infrastruktur. Ia menuturkan, salah satunya berkunjung dan meminta dukungan kepada BPIW.

“DPRD terus mendorong pemerintah kabupaten menjajaki kerjasama dengan swasta, agar menanamkan modalnya untuk pembangunan di Karangasem,” ungkap Sujanayasa. Ia berharap, kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Karangasem ke BPIW akan membawa berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur di Karangasem. **(ris/infoBPIW)**

Miliki Peran Strategis, BPIW Perlu Terus Lakukan Publikasi



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan untuk terus gencar melakukan publikasi kinerjanya.

Indonesia, Gaudensius serta jajarannya saat melakukan kunjungan ke Kantor BPIW Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (4/8).

“Kita berharap kunjungan ini dapat lebih memacu BPIW dalam melakukan publikasi ke publik,” ujar Shanti.

Menurutnya, saat ini lembaga publik tak hanya dituntut mau bekerja keras, inovatif serta bekerja cerdas, namun juga dituntut untuk lebih rajin lagi melakukan publikasi melalui pemberitaan dan bentuk lainnya sebagai laporan kinerja kepada publik.

la menilai, BPIW memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur PUPR di Indonesia. Sehingga, hal itu perlu lebih dipublikasikan, agar masyarakat dapat lebih mengetahui hal-hal yang telah dilakukan BPIW.

Hal itu sebagai bentuk laporan kinerja kepada masyarakat luas.

Hal itu disampaikan Direktur Pengembangan Bisnis Media Indonesia, Shanty Nurpatricia didampingi Direktur Pemberitaan Media

Shanti juga mengakui, pihaknya berkunjung ke BPIW bersama jajaran agar dapat saling lebih mengenal. “Kita berharap kunjungan ini



Jajaran Pejabat BPIW Kementerian PUPR bersama Tim Media Group di Kantor BPIW.

Sumber: Dok. BPIW

dapat lebih memacu BPIW dalam melakukan publikasi ke publik,” ujar Shanti.

Sementara itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, BPIW tergolong lembaga baru di Kementerian PUPR yang mengemban tugas yang tak ringan.

“BPIW memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi, untuk memastikan keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR di Indonesia,” terang Rido.

BPIW, lanjut Rido, harus menjadi acuan pengembangan infrastruktur bagi unit organisasi (unor) teknis di Kementerian PUPR, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga serta Penyediaan Perumahan.

Rido memaparkan, Kementerian PUPR melalui BPIW dalam upaya mewujudkan pencapaian sasaran strategis pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah melakukan metode pendekatan wilayah

“BPIW memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi, untuk memastikan keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR di Indonesia,” terang Rido.

atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Seluruh wilayah di Indonesia terkelompokan ke dalam 35 WPS. Dalam WPS terdapat kawasan-kawasan yang arah pengembangannya pada kawasan industri,

kawasan wisata, kota baru publik, termasuk Kota Cerdas Berkelanjutan dan lainnya.

Rido berharap, kerja keras jajaran BPIW mendapat dukungan dari media massa dalam bentuk publikasi. “Salah satunya dari media-media yang dimiliki Media Group,” ucapnya.

Dengan begitu menurut Rido rencana-rencana pembangunan dapat terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui kinerja yang telah dilakukan BPIW.

“Pertemuan ini juga diharapkan dapat semakin mempererat kerja sama Media Group dengan Kementerian PUPR, serta khususnya dengan BPIW,” tukas Rido. **(tim/infoBPIW)**

Kementerian PUPR Bangun Konektivitas KSPN Borobudur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan ambil bagian dalam memacu pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dengan melakukan akselerasi pengembangan konektivitas. Sehingga, akses menuju lokasi-lokasi wisata

“Kementerian PUPR mendukung pengembangan pariwisata di Borobudur dan sekitarnya, salah satunya dengan membangun Jalan Tol Cilenyi-Garut-Tasikmalaya-Yogyakarta,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan

di kawasan Borobudur mudah dicapai dan dapat mampu mengundang banyak wisatawan mancanegara ataupun domestik.

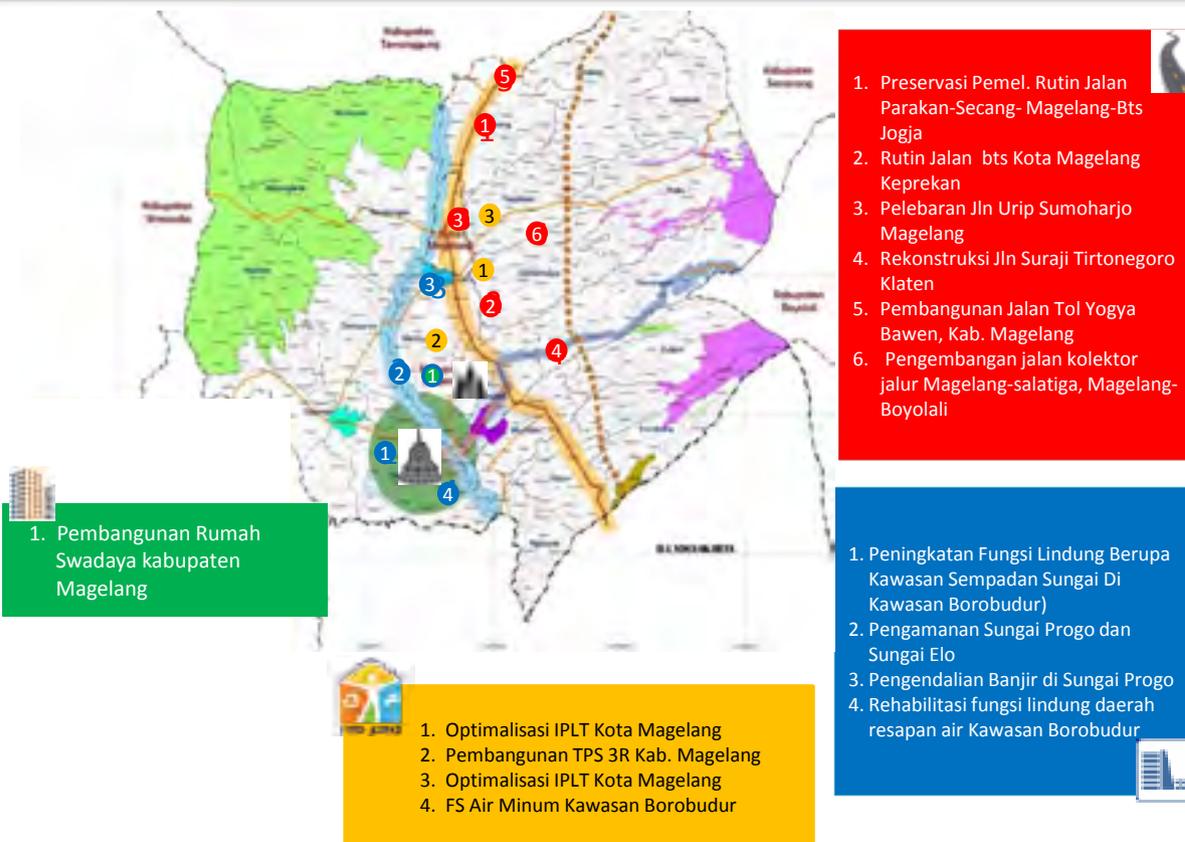
“Kementerian PUPR mendukung pengembangan pariwisata di Borobudur dan sekitarnya, salah

satunya dengan membangun Jalan Tol Cilenyi-Garut-Tasikmalaya-Yogyakarta,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Badan Otoritas Pariwisata Borobudur di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman di Jakarta, Selasa (22/8).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro serta perwakilan kementerian terkait dan pemerintah daerah di lokasi KSPN Borobudur.

Rido juga menjelaskan, ada rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta. “Nantinya juga akan ada peningkatan jalan nasional akses dari bandara menuju destinasi wisata di kawasan Borobudur yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR,” terangnya.

DEVELOPMENT PLAN KSPN BOROBUDUR TAHUN 2015-2019



Sumber: Dok. BPIW

Jalan nasional yang ada di dalam kawasan Borobudur juga akan mendapat penanganan untuk dilakukan peningkatan termasuk jalan pantai selatan Jawa yang melewati 3 Kabupaten yakni Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul.

“Kementerian PUPR juga terus melakukan koordinasi dengan Bank Dunia dalam mengawal pencapaian bantuan dana *loan* (kredit,-red) untuk sektor pariwisata di KSPN prioritas,” ungkap Rido.

Sementara itu, Arief Yahya mengatakan, Badan Otoritas Borobudur ini akan memberikan tagline untuk Borobudur, yaitu Maha Karya Budaya Dunia atau Cultural Masterpiece. Menurutnya, Badan Otoritas Pariwisata Borobudur mempunyai zona koordinatif meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Jawa Tengah. Yaitu Borobudur-Yogyakarta, Dieng, Surakarta-Sangiran, dan Semarang-Karimunjawa.

“Kementerian PUPR juga terus melakukan koordinasi dengan Bank Dunia dalam mengawal pencapaian bantuan dana *loan* (kredit,-red) untuk sektor pariwisata di KSPN prioritas,” ungkap Rido.

la mengatakan, Badan ini akan dipimpin Direktur Utama yang harus bertanggungjawab untuk mengembangkan infrastruktur dan utilitas dasar dari kawasan pariwisata tersebut.

Sebelum mengakhiri rapat, Luhut B. Panjaitan berharap, pengembangan KSPN Borobudur dan sekitar dapat segera dijalankan dan berkembang dengan baik.

“Pemerintah memandang perlu dilakukan karena investasi di sektor pariwisata itu *reborn*-nya (kembali,-red) cepat dan sektor pariwisata itu mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dengan baik dan cepat,” tuturnya.

Dengan begitu, ia juga berharap, target-target Kementerian Pariwisata dalam jumlah kunjungan dan pendapatan negara dapat tercapai bahkan capaiannya terus melampaui angka yang telah ditetapkan. **(ris/infoBPIW)**

BPIW Susun Rapermen Anjungan Cerdas di 35 WPS



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas.

Hal itu diungkapkan dalam diskusi mengenai Mekanisme Pembiayaan Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas yang dibuka oleh Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Wahyu Hendrastomo di Jakarta, Senin (21/8).

Narasumber dari kegiatan ini adalah Sri Bagus Guritno, Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara, Kementerian Keuangan, Purwito. Acara tersebut juga dihadiri beberapa kalangan seperti perwakilan *Center for Sustainable Infrastructure*, perwakilan Direktorat Barang Milik Negara serta perwakilan unit organisasi di lingkungan BPIW.

“Kegiatan ini juga ditujukan agar dapat menjaring informasi terkait sistem pengelolaan Anjungan Cerdas dengan biaya pembangunan dari APBN dan Non APBN,” terang Wahyu.

Wahyu menyatakan, Rapermen yang dirancang tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pengelolaan Anjungan Cerdas di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

“Kegiatan ini juga ditujukan agar dapat menjaring informasi terkait sistem pengelolaan Anjungan Cerdas dengan biaya pembangunan dari APBN dan Non APBN,” terang Wahyu.

Lebih lanjut Ia mengatakan, saat ini untuk skema pembangunan Anjungan Cerdas memiliki tiga peluang pilihan, yakni bersumber dari APBN, APBN+Non APBN serta murni Non APBN. “Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan untuk diakomodir dalam Rapermen nanti,” jelas Wahyu.

Selain itu, pengelolaan Anjungan Cerdas juga memiliki beberapa peluang pilihan, yakni melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Badan Layanan Umum serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Hal itu perlu juga dipertimbangkan masuk dalam draf Rapermen Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas,” tegas



Progres pembangunan anjungan cerdas di Rambut Siwi Bali.

Sumber: Dok. BPIW

Wahyu. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, I Gede Wayan Samsi Gunarta menerangkan, saat ini *pilot project* Anjungan Cerdas dibangun BPIW di Bali dan Trenggalek diadaptasi dari konsep Michino-Eki yang merupakan Road Side Station yang dikembangkan di Jepang.

“Konsep tersebut dianggap yang paling cocok untuk diterapkan di jalan-jalan nasional Indonesia,” ungkap Samsi.

Menurut Samsi, pembangunan Anjungan Cerdas untuk mengembangkan tujuan pariwisata baru, media promosi produk-produk lokal di wilayah, termasuk pengembangan wilayah serta optimalisasi pelayanan jalan nasional. Samsi mencontohkan, Anjungan Cerdas

yang saat ini tengah dibangun di Rambut Siwi, Bali akan menjadi pengembangan ekonomi, kawasan serta budaya. Dengan begitu, keberadaan Anjungan Cerdas

“Diharapkan pengelolaan Anjungan Cerdas nantinya dilakukan secara bersinergi dan sinkron, sehingga akan lebih mudah, karena dilakukan bersama-sama,” imbuh Sri.

tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu percepatan pertumbuhan wilayah di kawasan barat Bali.

Di tempat sama, Sri Bagus Guritno menilai konsep yang disasar dalam Anjungan Cerdas memang hal yang baik. “Dalam satu lokasi

pembangunan disasar sejumlah tujuan. Hal itu merupakan langkah yang baik,” terang Sri.

Dengan begitu, lanjutnya, pembangunan dan pengelolaan Anjungan Cerdas akan makin baik apabila dilakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, dan pemerintah daerah.

“Diharapkan pengelolaan Anjungan Cerdas, nantinya dilakukan secara bersinergi dan sinkron, sehingga akan lebih mudah, karena dilakukan bersama-sama,” imbuh Sri. **(Pona/Ris/infoBPIW)**

Genjot Pengembangan Suramadu, Potensi Investasi Swasta Rp 53 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan pengembangan wilayah di kawasan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), Jawa Timur. Dalam mewujudkan percepatan pengembangan wilayah di kawasan tersebut, saat ini telah disiapkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dasar di dalam kawasan maupun wilayah sekitar kawasan tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat menjadi pembicara dalam "Suramadu



Kementerian PUPR membidik percepatan pengembangan wilayah di kawasan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu)

Investment Gathering" yang mengambil tema "The Investment Opportunities of Suramadu Bridge Area" di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (31/7).

Hadir pembicara lain dalam kegiatan tersebut yakni, Himawan Hariyoga, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

BKPM, Bastary Pandji Indra, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, serta Agus Wahyudi, Plt Deputi Perencanaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Rido menjelaskan, Kementerian PUPR tengah menerapkan pola pengembangan

berbasis kewilayahan yang disebut dengan istilah Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Seluruh wilayah di Indonesia telah dikelompokkan ke dalam 35 WPS. Adapun untuk wilayah Suramadu masuk ke dalam WPS 13 meliputi Malang-Surabaya-Bangkalan,” terang Rido.

Untuk WPS 16, lanjut Rido, sejumlah rencana pengembangan infrastruktur dasar, antara lain terdapat pembangunan jalan lintas utara Madura, peningkatan jembatan Medaeng, pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan, pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan.

jalan Trenggalek-Bendungan, jaringan Jalan Lingkar Wilis,

“Seluruh wilayah di Indonesia dikelompokkan ke dalam 35 WPS. Adapun untuk wilayah Suramadu masuk ke dalam WPS 13 meliputi Malang-Surabaya-Bangkalan,” terang Rido.

“Ada juga pembangunan embung Cangkerman, pembangunan embung Samiran di Pamekasan, pembangunan

terus mempromosikan potensi investasi di kawasan Jembatan Suramadu. Menurutnya, potensi investasi di sekitar Jembatan Suramadu dan kawasan sekitar mencapai Rp 53 triliun.

la menjelaskan, saat ini ada dua lokasi kawasan yang ditawarkan kepada investor internasional, yaitu Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). “Dalam acara ini kami mengundang investor untuk dapat mengetahui dan bisa menanamkan modal di wilayah Suramadu,” jelasnya.

Menurutnya, pengembangan infrastruktur di wilayah Madura masih terkendala terbatasnya anggaran pemerintah, sehingga peran swasta diharapkan bisa menjadi solusi terhadap persoalan finansial.

Kemudian, Bastary Pandji Indra menyatakan, potensi pariwisata di Madura memang menjanjikan. Menurutnya, Madura memiliki budaya dan sumber daya alam yang menarik untuk dikembangkan.

“Dari sisi sumber daya alam menarik, budayanya juga banyak keunikan, namun dalam penerimaan terhadap wisatawan memang perlu lebih terbuka dan ramah lagi,” terangnya

Di tempat yang sama, Herman Hidayat menerangkan, Madura memiliki empat kabupaten yakni Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan. “Saat ini empat kabupaten tersebut perkembangannya belum terlalu menggembirakan,” ujar Herman. la berharap hadirnya investor swasta akan membuat percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Madura.

la menjelaskan, sejumlah proyek yang ditawarkan kepada investor antara lain, pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, jalan tol, kawasan industri di Labang. “Kita juga menawarkan kepada investor Kawasan Industri di Klampis. Ada juga proyek *Central Business District*, proyek perumahan dan lainnya,” paparnya. **(ris/infoBPIW)**

“Ada juga pembangunan jalan baru, *underpass* Jemursari, pelebaran jalan pelabuhan Tanjung Bumi, pembangunan jalan Talok-Druju-Sendang Biru, pembangunan jalur lingkar selatan Pacitan-Malang-Jember-Banyuwangi,” tambahnya.

Selain itu, ada juga pembangunan jalan dan jembatan Pelabuhan Prigi-Madiun,

embung Batolebar di Sampang, dan pembangunan embung air baku Poja Parsanga di Sumenep. Kemudian ada pembangunan pengaman pantai Slopeng di Sumenep dan rencana pengembangan infrastruktur dasar lainnya,” papar Rido.

Sementara itu, Himawan Hariyoga menyatakan, pihaknya bersama BPWS juga



Sumber: Dok BPIW

Pengembangan Infrastruktur PUPR di KSPN Tingkatkan Kunjungan Wisman

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu akselerasi pengembangan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas. Dukungan Kementerian PUPR terhadap pengembangan KSPN prioritas, mulai dari pengembangan infrastruktur di kawasan menuju destinasi wisata hingga di dalam kawasan destinasinya sendiri.

"Kementerian PUPR memberikan dukungan terhadap sistem konektivitas (jalan,-red) agar memudahkan akses menuju KSPN prioritas. Terwujudnya kemudahan akses menuju destinasi wisata akan menaikkan tingkat kunjungan wisatawan," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Forum Diskusi "Kebijakan Pengembangan Pariwisata: Upaya Pencapaian Target Wisman Sebanyak 20 Juta di Tahun 2019" di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Jakarta, Senin (29/8).

Rido menambahkan, ada juga dukungan infrastruktur PUPR terhadap pengembangan KSPN prioritas berupa peningkatan kualitas dan kenyamanan di dalam kawasan

destinasi. "Kemudian ada juga sarana hunian atau perumahan untuk para pekerja di kawasan wisata," terang Rido.

10 KSPN prioritas tersebut, ungkapnya, KSPN Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo dan Morotai. Selain itu, ada

"Terwujudnya kemudahan akses menuju destinasi wisata akan menaikkan tingkat kunjungan wisatawan," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan.

KSPN prioritas tambahan, yakni Toraja dan Mandeh, sehingga totalnya 10+2 KSPN prioritas.

Lebih lanjut Rido menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR melakukan pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah yang ada

di Indonesia semuanya telah terkelompokan pada 35 WPS.

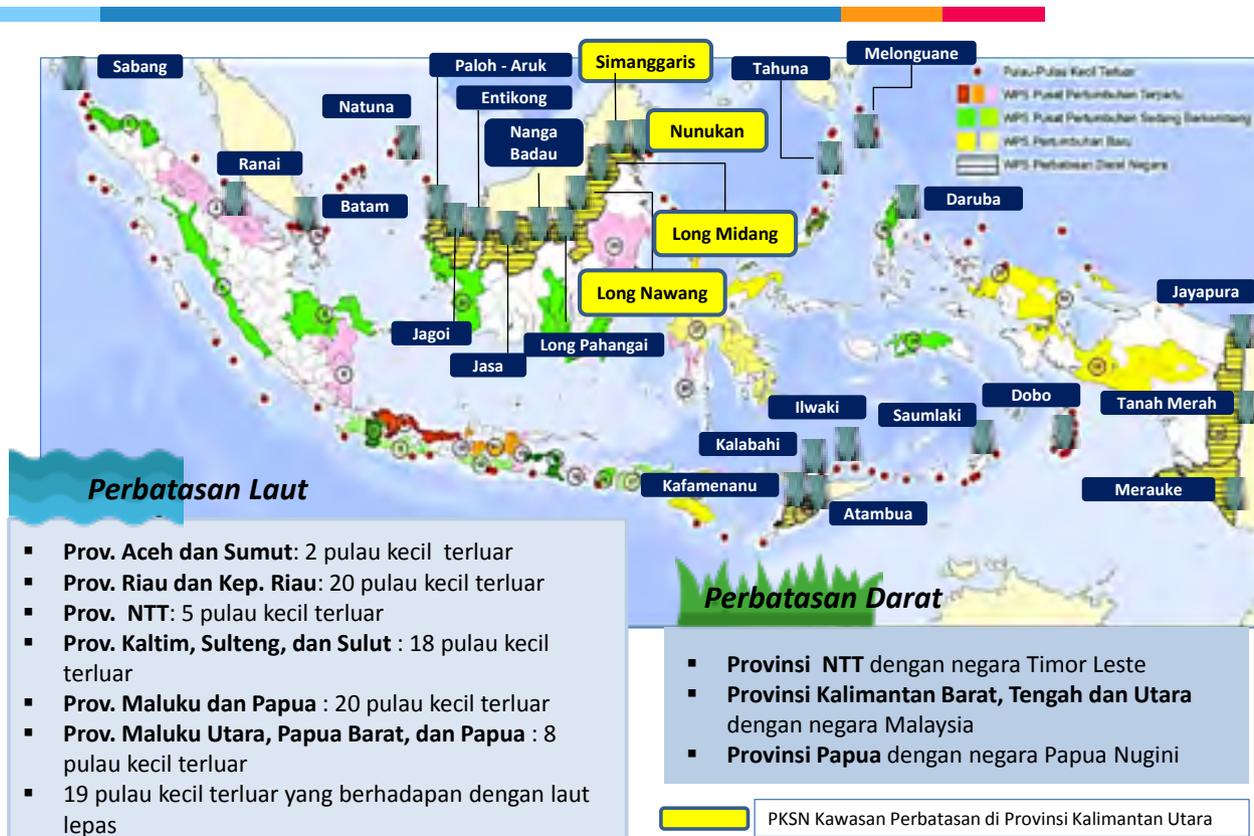
"Dukungan terhadap pengembangan KSPN, BPIW melakukan penyusunan *Masterplan* dan *Development Plan* (MPDP) WPS yang memuat program 10 tahunan, 5 tahunan, yang kemudian didetailkan ke dalam program jangka pendek dan tahunan," terangnya.

Rido mencontohkan, untuk pembangunan konektivitas di KSPN Danau Toba seperti Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi-Siantar-Parapat, pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kab. Samosir, dan Pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kab. Samosir. "Untuk setiap KSPN tentu ada pembangunan konektivitasnya," terangnya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga pengelolaan sampah di destinasi wisata KSPN, pembangunan taman dan kursi-kursi publik dan lainnya, agar dapat memberi kenyamanan para wisatawan.

Hadir dalam diskusi tersebut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Manoaifa, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan

SEBARAN 26 PKS N PERBATASAN: KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN UTARA (KALTARA) DALAM PERSPEKTIF NASIONAL



Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata (Kemepar), Dadang Rizki, serta perwakilan akademisi dan praktisi perencanaan.

Di tempat sama, Taufik Madjid mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan banyak desa wisata. "Dalam hal ini kami lebih pada pemberdayaan masyarakat desanya, agar masyarakat desa wisata siap dalam menerima wisatawan dengan sikap yang lebih baik," ungkap Taufik.

Dengan begitu, lanjut Taufik, dalam mengembangkan desa wisata, Kemendes PDTT melakukan pendampingan terhadap masyarakat. "Program yang digulirkan beragam pelatihan, mulai dari pengetahuan sikap baik menerima wisatawan, menjaga kelestarian destinasi wisata dan lainnya," terang Taufik.

Dadang Rizki menerangkan, saat ini Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 Program Prioritas guna mencapai

target. "Untuk memenuhi target yang ada, Kemenpar telah menetapkan tiga program teratas yakni *Digital Tourism*, *Homestay Desa Wisata*, serta *Air Connectivity*," terang Dadang.

Menurutnya, digitalisasi pariwisata merupakan hal yang tidak dapat dihindari

"Pembangunan 1000 *homestay* yang didorong Kementerian Pariwisata dan didukung Kementerian/Lembaga terkait diharapkan menjadi salah satu *quick win*," ucap Dadang.

karena saat ini siapa saja dapat menjagakses internet. Diperkirakan 63% dari total perjalanan wisata melalui koneksi internet. "Trendnya wisatawan itu melakukan riset, memesan tiket dan hotel secara digital saat ini," kata Dadang.

Selain itu, lanjutnya, pariwisata tidak dapat lepas dari peran masyarakat sekitar destinasi

wisata, contohnya keberadaan *homestay* yang melibatkan langsung masyarakat sebagai tuan rumah. Interaksi yang terjadi di dalam *homestay* antara pemilik rumah dan wisatawan menjadi atraksi tersendiri bagi wisatawan, di samping itu dampak ekonomi juga dirasakan langsung oleh pemilik rumah. "Pembangunan 1000 *homestay* yang didorong Kementerian Pariwisata dan didukung Kementerian/Lembaga terkait diharapkan menjadi salah satu *quick win*," ucap Dadang.

Dikatakannya juga bahwa konektivitas udara merupakan hal krusial dalam pariwisata. Sebab, mayoritas wisatawan mancanegara datang melalui bandar udara.

Sementara Suharso Manoarfa berharap, seluruh kementerian dan lembaga terkait bisa terus berkolaborasi dalam mengembangkan sektor pariwisata. Selain itu, kementerian dan lembaga terkait didorong untuk dapat merangkul swasta. "Intinya kita harus memberikan semangat optimisme kepada semua pihak dalam pengembangan sektor pariwisata ini," jelasnya. (ris/infoBPIW)

Optimalkan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PUPR Siap Sukseskan IMF-WB Annual Meeting



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang krusial untuk menyukseskan *International Monetary Fund World Bank Annual Meetings 2018 (IMF-WB AM 2018)* atau Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 di Bali.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido

Kementerian PUPR bertekat mengoptimalkan pembangunan infrastruktur krusial untuk menyukseskan International Monetary Fund World Bank Annual Meetings 2018

Matari Ichwan mengatakan, saat ini hal yang paling krusial adalah pembangunan simpang Ngurah Rai, karena bentuknya tak begitu memadai, sehingga perlu segera mendapat penanganan agar dapat mengurai kemacetan di kawasan tersebut. "Kita akan optimalkan beberapa pembangunan infrastruktur, seperti *underpass* di simpang Ngurah Rai,"

terang Rido saat Rapat Koordinasi Persiapan Final *International Monetary Fund World Bank Annual Meetings (IMF-WB) 2018* di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman di Jakarta, Rabu (24/8).

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B.

Panjaitan, hadir juga Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo perwakilan dari sejumlah kementerian dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Rido juga menyatakan bahwa akan dibangun infrastruktur yang menunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). "Untuk KSPN Danau Toba, dilakukan peningkatan akses jalan Danau Toba-Bandara Sibisa dan pembangunan infrastruktur lainnya," terang Rido.

paket wisata untuk para delegasi. "Paket-paket wisata ini dilakukan dengan layanan

"Kita akan optimalkan beberapa pembangunan infrastruktur, seperti untuk *underpass* di simpang Ngurah Rai," terang Rido.

standar internasional," ungkap Arief. Ia menjelaskan, destinasi yang masuk dalam paket tersebut merupakan destinasi yang

IMF-WB AM 2018. "Kementerian PUPR ini memang paten. Sigap dan bekerja cepat.

Terus lanjutkan ya, agar pelaksanaan IMF-WB AM 2018 sukses," tutur Luhut.

ia juga berharap, pelaksanaan IMF-WB AM 2018 mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Pasalnya, hal ini berkaitan erat dengan citra bangsa Indonesia dimata dunia, khususnya para pimpinan perbankan dunia dan pejabat lembaga financial internasional.

Sebagai informasi, IMF-WB AM 2018 merupakan pertemuan tahunan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta rekomendasi kebijakan IMF-WB ke depan.

Acara ini IMF-WB AM ini nantinya diikuti oleh Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota IMF-WB, pimpinan dan staf IMF-WB, para pelaku utama sektor keuangan, akademisi, CSC/NGO, pers dan *observer*. Jumlah peserta kegiatan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 15.000 orang. ([ris/infoBPIW](#))



Sumber: Dok BPIW

Selain itu, ada juga peningkatan infrastruktur PUPR di Bali, Toraja, Lombok, Labuan Bajo dan Borobudur. Menurutnya, sebagian ada yang sudah selesai, *on going* serta ada yang menunggu eksekusi.

Di tempat sama, Arief Yahya menyatakan, Kementerian Pariwisata dalam menyambut IMF-WB AM 2018 telah menyiapkan paket-

masuk dalam KSPN prioritas, seperti Toraja, Lombok, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba dan lainnya.

Sebelum mengakhiri rapat, Luhut B. Panjaitan mengapresiasi jajaran Kementerian PUPR yang sigap melakukan akselerasi pembangunan dalam menyelesaikan

Jaring Aspirasi Demi Penyempurnaan Penyusunan *Masterplan* dan Pra Desain KPPN Ajibata

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, saat ini tengah menyusun *Masterplan* dan Pra Desain Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Ajibata, Kab. Toba Samosir,

“Masterplan ini akan memuat visi dan misi pengembangan kawasan, dan juga strategi perwujudannya yang terjabarkan dalam matriks program tahunan,” ungkap Augusta.

Prov. Sumatera Utara. Sehubungan dengan hal itu tersebut, dilakukan diskusi di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, (21/8). Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Augusta Ersada Sinulingga mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyaring aspirasi dari

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan Aparatur Desa di Kecamatan Ajibata selaku *stakeholder* utama. Langkah ini dilakukan untuk mendapat berbagai masukan, demi penyempurnaan *master plan* dan pra desain yang tengah disusun.

Sebagai pijakan awal dalam pengembangan KPPN, menurut Augusta dibutuhkan *masterplan* yang berfungsi sebagai dokumen kesepakatan dan acuan bersama para pemangku kepentingan untuk 10 tahun ke depan. *“Masterplan ini akan memuat visi dan misi pengembangan kawasan, dan juga strategi perwujudannya yang terjabarkan dalam matriks program tahunan,”* ungkap Augusta.

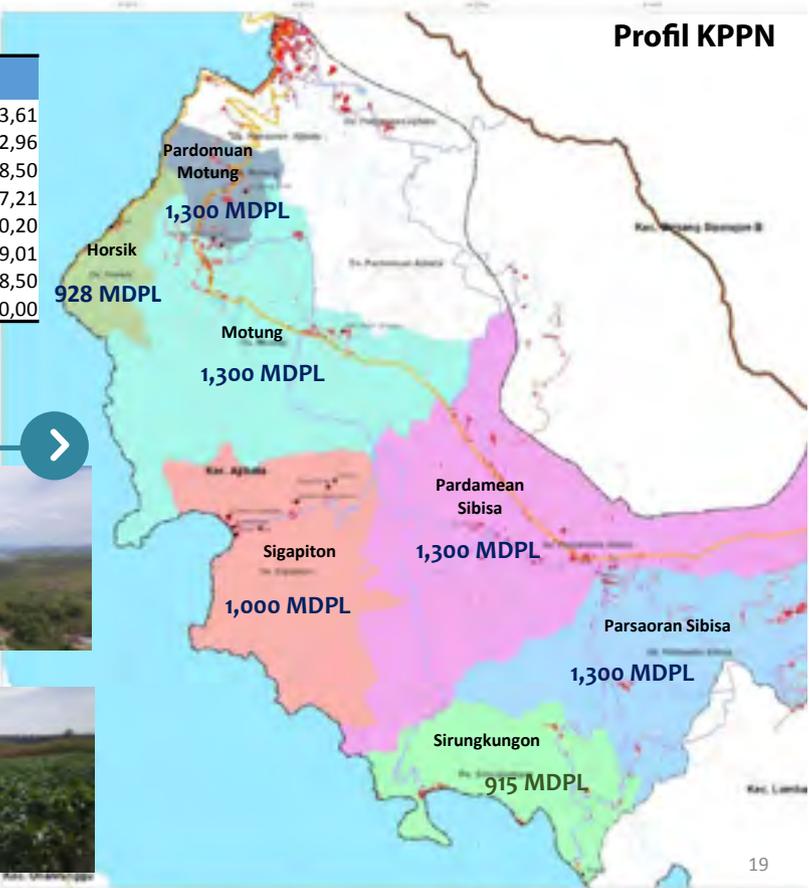
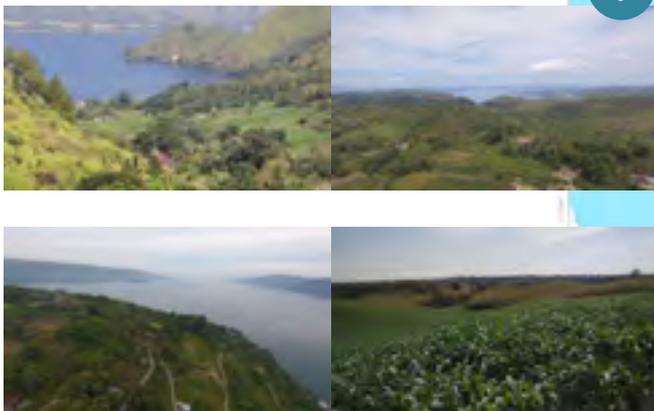
Dikatakannya juga bahwa pembangunan kawasan perdesaan sudah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 buku 3 yaitu pada bagian D tentang pembangunan 40 kawasan pertumbuhan baru atau biasa disebut KPPN. Selain itu, juga didalam Nawacita Presiden Jokowi, yakni mengenai pembangunan dari pinggiran. Menurut Augusta, kontribusi Kementerian PUPR dalam pengembangan

TOBA SAMOSIR

Desa	Luas (Km2)	%
Motung	8	13,61
Parsaoran Sibisa	13,5	22,96
Sirungkungan	5	8,50
Pardamean Sibisa	16	27,21
Pardomuan Motung	6	10,20
Horsik	5,3	9,01
Sigapiton	5	8,50
Jumlah	58,80	100,00

Sumber: Hasil Survei Lapangan dan Hitungan GIS, 2017

Sebanyak **80,77 %** Luas **Kecamatan Ajibata** termasuk kedalam Kawasan **KPPN Toba Samosir**



KPPN dapat dilakukan pada sektor produksi dan sektor pengolahan, serta sektor pemasaran. Kementerian PUPR juga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan status dari jaringan jalan yang dilalui.

“Kabupaten Toba Samosir khususnya Kecamatan Ajibata berfungsi sebagai *hinterland* tempat berlangsungnya aktivitas produksi dan pengolahan komoditas unggulan, dalam ini perkebunan kopi arabika,” tutur Agusta.

Kondisi tersebut menurutnya harus didorong dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan teknologi yang modern mulai dari tahap budidaya hingga pemasaran produk

Beberapa pejabat juga memberikan kata sambutan, seperti Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kementerian Koordinator Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Awal Subandar. Dalam kesempatan itu, Awal berharap pemerintah daerah Kabupaten Toba Samosir dapat proaktif dalam hal mengawal penyusunan *master plan* ini.

“Kabupaten Toba Samosir khususnya Kecamatan Ajibata berfungsi sebagai *hinterland* tempat berlangsungnya aktivitas produksi dan pengolahan komoditas unggulan, dalam ini perkebunan kopi arabika,” tutur Agusta.

Selain Awal Subandar, kata sambutan juga disampaikan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Desa/Kota Kementerian Pariwisata, Vitria Ariani. Vitria menyampaikan beberapa hal, salah satunya mengenai rencana Kementerian Pariwisata

yang akan mengembangkan 2000 Desa Wisata di Indonesia, pada tahun ini. Jalannya diskusi ini dipandu oleh moderator, Sanusi Sitorus, selaku Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan BPIW.

Kegiatan ini dihadiri beberapa kalangan seperti Kasubdit Pengelolaan selaku Perwakilan dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Suprihartono, Unit Organisasi dan Satker di Lingkungan Kementerian PUPR, perwakilan Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kabupaten Toba Samosir, Camat Ajibata dan 7 Kepala Desa yang termasuk ke dalam deliniasi KPPN Ajibata Kabupaten Toba Samosir. **Shindie/hen/infobpiw**

Kembangkan Infrastruktur Terpadu, Kementerian PUPR Perkuat Kawasan Perbatasan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus memacu akselerasi pengembangan infrastruktur terpadu di kawasan perbatasan. Hal itu untuk memperkuat wilayah perbatasan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan Nawacita dan Visi Misi Presiden.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, daratan yang merupakan wilayah perbatasan di Indonesia meliputi, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste.

"Wilayah perbatasan lainnya seperti Provinsi Kalimantan Barat, Tengah dan Utara dengan Malaysia serta Provinsi Papua dengan Papua Nugini," papar Rido saat berbicara dalam forum diskusi yang mengambil tema "Jelajah Tapal Batas 2017" di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (10/8).

Hadir sebagai pembicara lain, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah, Pelaksana Tugas Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Marvel Situmora, dan Walikota Tarakan, Sofian Raga. Diskusi ini juga diikuti perwakilan asosiasi pengusaha, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan kelompok masyarakat.

Menurut Rido, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR telah mengamankan pengembangan wilayah perbatasan melalui pemenuhan pelayanan dasar serta peningkatan konektivitas sebagai upaya menin-

gkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.

"Di perbatasan dilakukan konektivitas untuk membuka keterisolasian, sehingga perekonomian rakyat meningkat. Kemudian juga dilakukan pelayanan sosial dasar dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN terpadu," terang Rido. Untuk pengembangan konektivitas kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara, program infrastruktur yang digulirkan pada anggaran tahun 2017

"Di perbatasan dilakukan konektivitas untuk membuka keterisolasian, sehingga perekonomian rakyat meningkat. Kemudian juga dilakukan pelayanan sosial dasar dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN terpadu,"
terang Rido.

meliputi, Pembangunan Jalan Long Boh – Metulang–Long Nawang,

"Untuk Pembangunan Jalan Long Bawan – Long Midang, Pembangunan Jalan Long Pujungan–Long Kemuat – Langap dan Pembangunan Jalan Mensalong – Tau Lumbis difokuskan pada upaya membuka hutan terlebih dahulu," ujarnya.

Kemudian, ada juga Preservasi Rehabilitasi Jalan Dalam Kota Tanjung Selor, Rehabilitasi Mayor Jalan Sekatak Buji – Malinau, Rehabilitasi Mayor Jalan Lingkar Pulau Sebatik, Rehabilitasi Mayor Jalan Mensalong –APAS.

"Pelebaran Jalan Batas Bulungan – Tanjung Selor, pelebaran Jalan Tanjung Selor – Tanjung Palas, Pelebaran Jalan SP. 3 Tanjung Palas – Sekatak Buji, Preservasi Rehabilitasi Jalan Dalam Kota Nunukan serta Rekonstruksi Jalan Simanggaris – Batas Negara," jelasnya.

Adapun pengembangan keciptakaryaan, lanjut Rido meliputi, pembangunan Break Water Pantai Tanjung Aru, Kepulauan Sebatik, pembangunan Sea Wall Pantai Amal Baru, Kota Tarakan, pembangunan embung serbaguna Tanjung Agung, pembangunan embung serbaguna Pulau Bunyu Tahap I serta pembangunan intake dan jaringan transmisi Indulung Kota Tarakan.

Selain itu, ada peningkatan infrastruktur permukiman kawasan kumuh di Sungai Bolong Kelurahan, Nunukan Utara, pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan desa raspen tubu di Kec. Malinau Utara, pembangunan drainase lingkungan Pulau Sebatik dan lainnya.

Rido menjelaskan, peningkatan kualitas rumah swadaya dilakukan mencapai 1.500 unit, pembangunan rumah khusus 100 unit serta revitalisasi rumah khusus 50 unit.

Di tempat sama, Irianto Lamri menerangkan, selama ini pembangunan infrastruktur fisik dan telekomunikasi telah memacu pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Utara. "Meskipun masyarakat itu sangat berharap agar mutunya bisa meningkat. Idealnya bisa melebihi fasilitas yang ada di negara tetangga," terangnya.

Menurutnya, pemerintah sudah terlalu lama fokus di pusat pemerintahan, terutama di Pulau Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera,



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Matamasin

Sumber: Dok. PUPR

namun tiga tahun kebelakang telah beda. "Hal itu terlihat di wajah pintu-pintu lintas batas negara serta desa dan kecamatan di wilayah perbatasan," terangnya. Untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur telekomunikasi sudah dilakukan, sehingga meningkatkan mobilitas warga.

Hal itu sudah membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. "Pada tahun 2015, ekonomi Kalimantan Utara tumbuh 3,75 persen, namun data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I-2017 menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara 6,17 persen. Angka itu menempati pertumbuhan tertinggi kedua setelah Kalimantan Tengah 9,49 persen," jelasnya.

Lebih lanjut, Ia mengakui, akses jalan antarkabupaten dan kecamatan sudah lebih baik, penggunaan telepon tak perlu memakai kartu operator negara tetangga atau memanjat pohon untuk mencari sinyal, meski ada beberapa kawasan masih lemah sinyalnya. Pembicara lainnya, Ririek Adriansyah men-

gatakan, pihaknya saat ini terus memperluas jangkauan jaringan internet hingga ke wilayah perbatasan. Ia berharap hal tersebut akan dampaknya pada perekonomian.

Ia menerangkan, data Bank Dunia pada 2010 menunjukkan, setiap 10 persen peningkatan

yang belum bersinyal dari total 79.191 desa dan kelurahan di Indonesia," ucap Marvel.

Dengan begitu, lanjut Marvel, pihaknya menempuh sejumlah cara untuk mengatasi kemacetan komunikasi, antara lain melalui program Palapa Ring yang menghubungkan kota/kabupaten dengan jaringan serat optik, membangun infrastruktur di wilayah tanpa sinyal, dan menyediakan akses internet melalui desa broadband terpadu.

Ia menjelaskan, wilayah perbatasan di Kalimantan Utara merupakan bagian yang menjadi sasaran pembangunan menara base transceiver station (BTS). Program ini menasar 228 lokasi sepanjang tahun 2016-2017, antara lain 41 lokasi di Kalimantan Utara, 22 lokasi di Nusa Tenggara Timur, dan 18 lokasi di Papua. **(ris/infoBPIW)**

"Dalam lingkup nasional ada 8.831 desa yang belum bersinyal dari total 79.191 desa dan kelurahan di Indonesia," ucap Marvel.

penetrasi internet akan memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38 persen di negara maju dan 1,12 persen di negara berkembang.

Di tempat sama, Marvel Situmora mengakui, saat ini masih ada sejumlah wilayah yang belum memperoleh sinyal telepon seluler. "Dalam lingkup nasional ada 8.831 desa

Kementerian PUPR Lakukan Antisipasi Resiko dari Mega Proyek Infrastruktur

Untuk membangun infrastruktur pada periode 2015-2019, Kementerian PUPR akan membelanjakan Rp 530 triliun atau lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Pada Rencana Strategis atau Renstra periode tersebut, target pembangunan cukup besar seperti pembangunan 65 bendungan, 1.000 km jalan tol, 550 ribu unit pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan peningkatan akses terhadap air minum menjadi 100% tahun 2019.

Setiap tahun Kementerian PUPR mempekerjakan ratusan kontraktor dan subkontraktor untuk melaksanakan ribuan paket fisik

Dengan besarnya target tersebut maka menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, instansinya merencanakan dan juga melaksanakan mega proyek setiap tahun. Banyaknya mega proyek tersebut menurut Rido, Kementerian PUPR telah melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pembangunan dan menghindari resiko bencana yang akan timbul atau avoiding disaster dari mega proyek.

"Kita telah bekerja sama dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, untuk mengambil

resiko, bila terjadi ketidakpastian hukum. Jadi ada resiko yang telah kita perhitungkan. Itu juga bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur," ujar Rido saat menjadi salah satu pembicara pada seminar *Avoiding Disaster Of Mega Project*, di Jakarta, Senin (7/8).

Dalam merealisasikan mega proyek, menurut Rido, Kementerian PUPR melibatkan seluruh Unit Organisasi seperti Direktorat Jenderal, Pelaksana di daerah yaitu Balai Pelaksana Jalan Nasional dibantu oleh Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) terkait, Balai Wilayah Sungai dibantu oleh SNVT terkait, SNVT Cipta Karya, dan SNVT Perumahan. Jumlah SNVT tahun 2016 mencapai 782 SNVT di 34 provinsi. Sedangkan Balai berjumlah 54 SNVT.

Pergantian kepemimpinan menurut Rido juga tidak mempengaruhi pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan, karena pelaksanaan proyek pembangunan berlandaskan pada kontrak kerja yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, yakni antara pemerintah dan pihak kontraktor.

Lebih lanjut Rido mengatakan setiap tahun Kementerian PUPR mempekerjakan ratusan kontraktor dan subkontraktor untuk melaksanakan ribuan paket fisik, yang meliputi desain, new development, dan manajemen aset. Setiap paket bisa membutuhkan waktu satu tahun atau *multiyears*. Dikatakannya juga bahwa setiap penambahan Rp 1 triliun

MENINGKATKAN KETAHANAN AIR, KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI



MENDUKUNG KONEKTIVITAS BAGI PENGUATAN DAYA SAING



INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP



untuk investasi infrastruktur, kementerian PUPR membutuhkan tambahan 14.000 tenaga kerja ahli atau terampil. Setiap tahun kita membutuhkan 1,4 juta tenaga kerja (7 juta dalam 5 tahun) untuk mencapai target pembangunan.

“Kementerian PUPR bekerja keras agar infrastruktur menghasilkan *outcome* yang diharapkan, yaitu meningkatkan konektivitas, ketahanan air dan pangan, serta kualitas hidup, menuju keseimbangan pengembangan wilayah,” tegas Rido.

Sementara itu, *Keynote Speaker* acara tersebut, Sekjen Kementerian PUPR Prof.Anita Firmanti menyatakan semakin besar proyek yang dilaksanakan, maka akan semakin kompleks masalah yang dihadapi.

Untuk itu menurut Anita perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang terus menerus terhadap setiap proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini untuk memperkecil resiko yang kemungkinan akan timbul. “Seminar ini merupakan kesempatan bagi kita untuk dapat memiliki pengetahuan yang berguna

dalam mencegah terjadinya bencana dalam proses pelaksanaan pembangunan pembangunan infrastruktur,” tegas Anita.

Dalam kesempatan itu juga dihadirkan pembicara dari *Programmer Director M.Sc in*

kepulauan dan memiliki jumlah penduduk yang besar,” ungkapnya.

Namun diakuinya menjalankan mega proyek, tidak semudah yang diperkirakan, karena resiko yang akan timbul banyak seperti tidak terselesaikannya proyek hingga tuntas dan kurangnya jaminan keuangan. Untuk itu semua hal harus diperhitungkan dengan matang untuk memperkecil resiko yang akan timbul.

Selain narasumber tersebut juga dihadirkan narasumber lain yakni, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, Yaya Supriyatna Sumadinata.

“Kementerian PUPR bekerja keras agar infrastruktur menghasilkan *outcome* yang diharapkan, yaitu meningkatkan konektivitas, ketahanan air dan pangan, serta kualitas hidup, menuju keseimbangan pengembangan wilayah,” tegas Rido.

Major Programme Management Said Business School, Universitas Oxford, Inggris yakni Dr. Atif Ansar. Atif menyatakan bahwa membangun mega proyek merupakan kesempatan bagi suatu negara untuk berkembang. “Indonesia punya kesempatan untuk membangun transportasi publik untuk menghubungkan suatu daerah ke daerah lain, mengingat Indonesia merupakan negara

Pada kesempatan itu disampaikan mengenai beberapa hal seperti tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Puluhan peserta yang hadir dalam seminar ini berasal dari instansi pemerintah, kalangan swasta, dan akademisi. **Hendra/infobpiw**

Hadirkan Direksi Lippo, BPIW Minta Mega Proyek Meikarta Dibangun Sesuai Aturan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta jajaran Direksi Lippo Meikarta mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam rencana pembangunan mega proyek Kota Baru Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Kota Baru Meikarta di Kantor BPIW, Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (2/8).

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyatakan, BPIW merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas mengelola keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah di Tanah Air.

"Dalam rapat koordinasi ini, sengaja kami undang jajaran Direksi Meikarta yang akan mengembangkan Kota Baru Meikarta yang prediksi bakal menampung penghuni sekitar 1,5 juta jiwa pada tahun 2030," ungkap Rido.

Menurutnya, mega proyek tersebut dipastikan akan memiliki pengaruh yang multi dimensi, mulai dari bangkitan lalu lintas, bangkitan buangan domestik seperti air limbah dan sampah, kebutuhan air baku, listrik dan lainnya. Lebih lanjut, ia mencontohkan, saat ini saja Jakarta mengalami defisit pemenuhan air baku. Sehingga, Jakarta untuk menu-

tupi kebutuhan air baku sebagiannya mengambil dari Waduk Jatiluhur.

Dengan begitu, ujarnya, keberadaan Kota Baru Meikarta yang menampung jutaan penghuni akan menambah beban kebutuhan akan air baku yang tak sedikit, termasuk penanganan sanitasinya.

"Untuk itu, Lippo Meikarta harus benar-benar patuh terhadap aturan yang berlaku,

"Lippo Meikarta harus benar-benar patuh terhadap aturan yang berlaku, sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah dan tak berpotensi menimbulkan kerugian yang luas," tegas Rido.

sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah dan tak berpotensi menimbulkan kerugian yang luas," tegas Rido.

Di tempat yang sama, Sekretaris BPIW, Firman H. Napitupulu mengatakan, BPIW memiliki tugas mengembangkan infrastruktur PUPR sekaligus pengendalian pemanfaatannya, agar pembangunan infrastruktur PUPR

tidak justru berdampak buruk terhadap kualitas keseimbangan daya dukung lingkungannya.

"Salah satu kasus yang saat ini kita bahas adalah rencana pengembangan Kota Baru Meikarta oleh pengembang swasta. Sebab, hal itu akan memiliki dampak luas dalam berbagai sektor di perkotaan Jakarta dan sekitarnya," ungkap Firman.

Untuk itu, BPIW berkewajiban untuk melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Direksi Lippo Meikarta, agar pengembangan yang dilakukan memperhatikan berbagai aspek kebijakan. "Seperti menghormati segala perizinan, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Provinsi (RTWP), Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTWK) dan aturan lainnya yang terkait pembangunan kawasan," ungkap Firman.

Selain itu, lanjutnya, amanah aturan pola berimbang 1:2:3, yakni 1 bangunan mewah, 2 bangunan menengah dan 3 bangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai dukungan program 1 juta rumah untuk MBR. "Dari iklannya Kota Baru Meikarta dibangun untuk kelas menengah ke atas, sehingga tidak membantu penyediaan rumah untuk MBR," tutur Firman.



Pembahasan proyek proyek Meikarta di BPIW

Sumber: Dok. BPIW

Sebelum mengakhiri diskusi, Firman menyatakan, BPIW akan melanjutkan diskusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi, untuk menggali lebih jauh tentang proses perizinan pembangunan skala besar yang berdampak terhadap kinerja pelayanan infrastruktur vital yang dibangun pemerintah melalui dana publik.

Kepala Pusat Pengembangan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga menyampaikan, pihaknya ingin memastikan agar rencana pengembangan Meikarta tak berdampak negatif pada perkembangan perkotaan di Jakarta dan sekitarnya. "Pembangunan Kota Baru Meikarta juga harus mampu melayani perkembangan penduduk di sekitarnya. Bukan hanya penghuni Meikarta," jelasnya.

Sementara itu, Ju Kian Salim, Direktur Infrastruktur Lippo Meikarta menyatakan, pihaknya memastikan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di negeri ini. "Tidak ada sedikitpun itikad dari kami, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku," ujar Ju Kian Salim. Menurutnya, Lippo Properti ini

berdiri sudah hampir 30 tahun. "Pengalaman yang cukup lama itu, telah memberi bekal agar kami lebih baik dalam segala hal. Kami juga yakin kalau pengembangan kota baru ini tidak memperhatikan masyarakat sekitar, tentu kami akan hancur," terangnya.

“Tidak ada sedikitpun itikad dari kami, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Ju Kian Salim.

Ju Kian Salim menambahkan, pengembangan Kota Baru Meikarta berangkat dari keinginan menangkap peluang untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat industri di kawasan Cikarang. "Kami yakin proyek ini akan mendukung pemerintah dalam mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, karena hampir 70% industri

nasional berada di kawasan Cikarang dan sekitarnya," terangnya.

Dijelaskannya, Kota Baru Meikarta memang dibangun untuk hunian masyarakat menengah ke atas, namun pada proyek lain Lippo telah banyak dan akan terus membangun rumah untuk MBR.

Ia berharap, pertemuan dengan BPIW terjalin komunikasi yang baik, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ju juga menyatakan, pihaknya bersedia melakukan pertemuan lanjutan dengan BPIW dan instansi terkait lain demi terjalinnya komunikasi yang baik. **(ris/infoBPIW)**

Percepat Pengembangan Kota Baru Publik Maja, BPIW Usulkan Bentuk Satgas Khusus

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengusulkan adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus Kota Baru Publik Maja. Pembentukan Satgas Khusus di sini akan memacu percepatan pengembangan Kota Baru Publik Maja yang terintegrasi.

“Satgas Khusus diperlukan untuk mengelola pembangunan Kota Baru Publik Maja yang terintegrasi. Hadirnya Satgas Khusus akan memudahkan mewujudkan rencana aksi yang telah disusun,” ungkap Kepala BPIW

Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat membuka Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Pengembangan Kota Baru Publik Maja di Kantor BPIW, Jakarta, Selasa (22/8). Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Kawasan

Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga, Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Triono Junoasmono, Kabid pengembangan Kota Besar dan Kota Baru, Rudi Siahaan, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Real Estate Indone-

“Hadirnya Satgas Khusus akan memudahkan mewujudkan rencana aksi yang telah disusun,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan

sia (REI), Hari Ganie, perwakilan dari seluruh unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR, perwakilan Pemerintah Provinsi Banten serta Pemerintah Kabupaten Bogor. Rido mengatakan, Kementerian PUPR senantiasa fokus untuk dapat mengembangkan

Kota Baru Publik Maja. “Pengembangan Maja ini, selain menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah,-red) juga akan memiliki kontribusi terhadap Program Sejuta Rumah untuk hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah,-red),” ungkap Rido.

la menyatakan, salah satu cara yang diambil untuk mengembangkan Kota Baru Publik Maja adalah melakukan pembangunan jalan akses Maja. “Saat ini penyediaan lahan serta hal yang terkait dengan pembangunan jalan, perizinan sudah ada solusi. Ke depan tinggal realisasinya,” ungkap Rido.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Ditjen Bina Marga, Triono Junoasmono mengatakan, saat ini proses studi kelayakan akses jalan Maja sedang dilakukan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN VI).



Sumber: Dok. BPIW

Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) yang ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2017.

la mengatakan, hal tersebut sesuai dengan komitmen Kementerian PUPR dalam kesepakatan yang dituangkan dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri PUPR dengan pemerintah daerah dan para pengembang.

Selain itu, ujar Rido, sosialisasi pengembangan Kota Baru Publik Maja perlu disosialisasikan lebih gencar lagi oleh seluruh pemangku kepentingan, agar semua pihak memiliki pemahaman sama serta dapat ikut berkontribusi dalam pengembangan Kota Baru Publik Maja. Di tempat sama, Rudi Siahaan mengatakan, rencana aksi pengembangan Kota Baru Pub-

lik Maja saat ini sudah mencakup peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, yakni Kementerian PUPR, pemerintah daerah setempat serta pengembang. Selain itu, rencana aksi yang disusun sekal-

cana aksi pengembangan kota baru ini, maka kita harapkan rencana aksi dapat segera terlaksana di masing-masing pemangku kepentingan dan juga semua pengembang," tegas Rudi.

**Kita harapkan rencana aksi dapat segera terlaksana di masing-masing pemangku kepentingan dan juga semua pengembang,"
tegas Rudi.**

igus mengingatkan kepada Kementerian/Lembaga terkait agar dapat bersama-sama mengembangkan Kota Baru Publik Maja, sesuai arahan RPJMN.

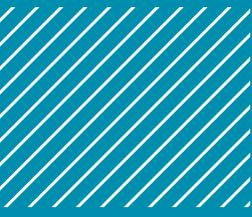
"Semua kewajiban masing-masing pemangku kepentingan sudah dijabarkan dalam ren-

Hari Gani menyampaikan, para pengembang berharap dilibatkan dalam pembahasan studi kelayakan (*feasibility study*) trase jalan akses Maja, agar studi itu dapat dijadikan dasar bagi para pengembang untuk menyusun siteplan masing-masing area pengembangannya.

"Keberadaan posisi jalan tersebut ditunggu pengembang pasalnya pembangunan jalan akan sangat mempengaruhi pergerakan harga tanah di kawasan Kota Baru Publik Maja," terangnya. **(indi/infoBPIW)**



Wujudkan Akselerasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru,
**PUPR Dukung Pengembangan
Infrastruktur KTM Kawasan
Transmigrasi**



Pengembangan dan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) kawasan transmigrasi menjadi salah satu program amanat Nawacita, yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Guna melakukan percepatan pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT) melakukan koordinasi terkait pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan memaparkan, Kementerian PUPR dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air menerapkan metode yang berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya terkelompokan dalam 35 WPS. "Melalui penerapan WPS ini diharapkan pengembangan infrastruktur dapat dilakukan dengan tepat, serta memberi efek berantai pada pengembangan di wilayah-wilayah sekitarnya," papar Rido.

Dalam setiap WPS tersebut terdapat beberapa tema kawasan pengembangan, seperti Kawasan Industri (KI), KTM, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Terkait dukungan terhadap KTM, ungkap Rido, Kementerian PUPR memprioritaskan KTM yang berada di area WPS serta telah memenuhi

kriteria kesiapan pengembangan infrastruktur. "Diharapkan dukungan infrastruktur PUPR akan mempercepat pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi dengan terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti akselerasi pengembangan agrobisnis dan agroindustri, serta fasilitas pengembangan sosial budaya. Selain itu juga sarana prasarana intra dan antar kawasan," jelas Rido.

Diharapkan juga sentra-sentra agrobisnis dan agroindustri dapat menarik investasi swasta dan menumbuhkembangkan pelopor-pelopor wirausaha baru sekaligus membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

Dirjen P2MKT Kementerian DPPDT, M. Nurdin sangat menyambut baik langkah yang dilakukan Kementerian PUPR dalam mewujudkan percepatan pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi tersebut.

Nurdin mengatakan bahwa pengembangan KTM membutuhkan banyak sentuhan dari instansi lintas sektor, terutama terkait infrastruktur dasar dari Kementerian PUPR. Hal ini perlu dilakukan, agar produk hasil pertanian masyarakat dapat lebih cepat didistribusikan ke pasar. "Dengan distribusi hasil panen yang lebih cepat, diharapkan pendapatan masyarakat juga akan lebih baik" ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, KTM Kawasan Transmigrasi pada umum membutuhkan dukungan infrastruktur jalan, jembatan, penyediaan

"Diharapkan dukungan infrastruktur PUPR akan mempercepat pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi dengan terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti akselerasi pengembangan agrobisnis dan agroindustri, serta fasilitas pengembangan sosial budaya. Selain itu juga sarana prasarana intra dan antar kawasan," jelas Rido.

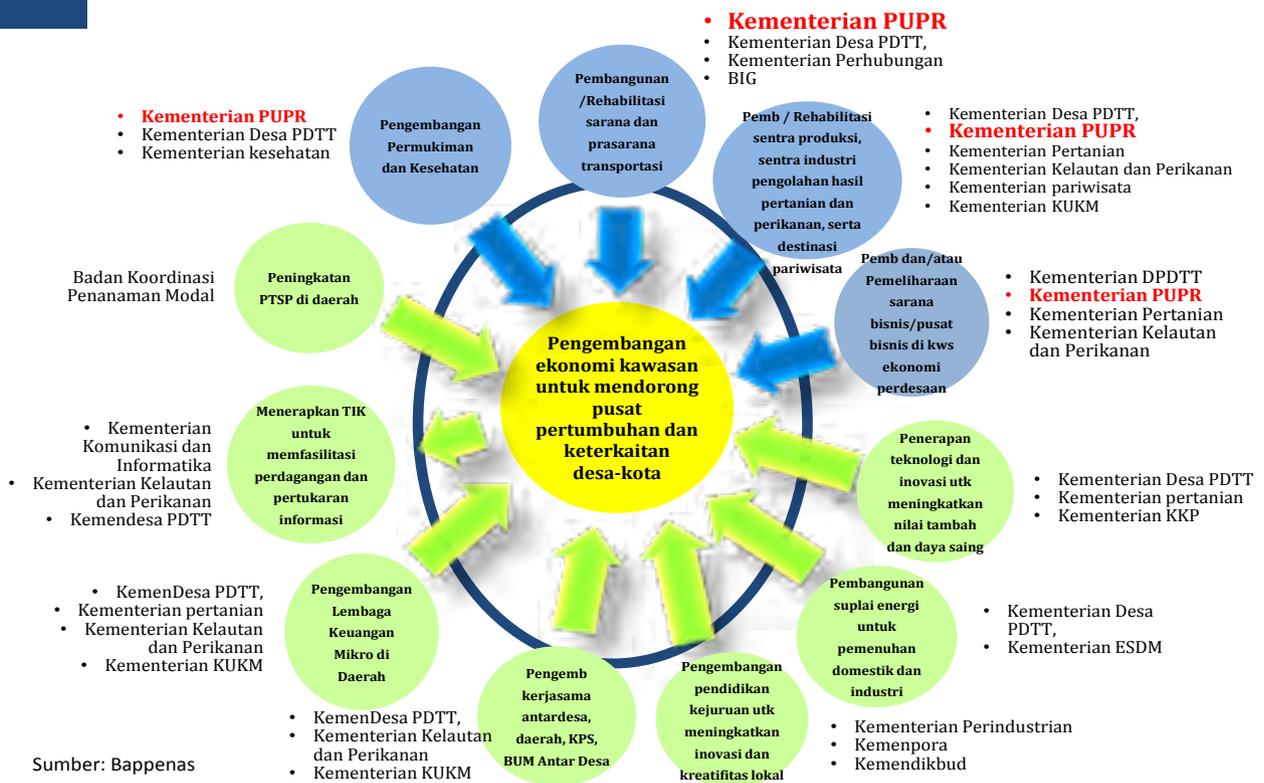


Audiensi percepatan pengembangan Kota terpadu mandiri (KTM) kawasan transmigrasi

Sumber: Dok. BPIW

Program Prioritas

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa-kota



air bersih dan lainnya. Ia juga menegaskan bahwa tim dari Kemen DPDDT akan proaktif menyampaikan usulan kepada Kementerian PUPR.

Nurdin juga menyampaikan bahwa, pengembangan KTM Kawasan Transmigrasi selaras dengan prioritas program Kemen DPDDT tahun 2017, yakni Produk Unggulan Desa (Prudes) serta Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

Program ini diusung, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Undang-undang tersebut mengamankan kebijakan pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya, membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Selain itu, Pengembangan Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan

komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Ia berharap, koordinasi yang dilakukan dengan BPIW dapat menghasilkan integrasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan

“Diharapkan ke depannya KTM bisa menarik minat kaum muda ber-transmigrasi, sehingga mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang tidak terarah ke kota-kota besar,” ungkap Nurdin.

kawasan transmigrasi terpadu. Nurdin menjelaskan, ada sekitar 17 kementerian atau lembaga yang diamanati memberikan dukungan pendanaan pembangunan dan pengembangan KTM di kawasan transmigrasi. Ketujuh belas kementerian atau lembaga itu yakni Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian.

Selanjutnya ada Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Kemudian juga melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BKKBN, Badan Urusan Logistik, BNI, dan BRI.

“Diharapkan ke depannya KTM bisa menarik minat kaum muda bertransmigrasi, sehingga mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang tidak terarah ke kota-kota besar,” ungkap Nurdin. Selain itu menurutnya KTM juga menjadi kota penyangga dalam konteks pembangunan per wilayah. Melalui KTM, rencana pengembangan pemenuhan kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan disatukan untuk memenuhi fungsi-fungsi perkotaan seperti pusat kegiatan ekonomi wilayah,

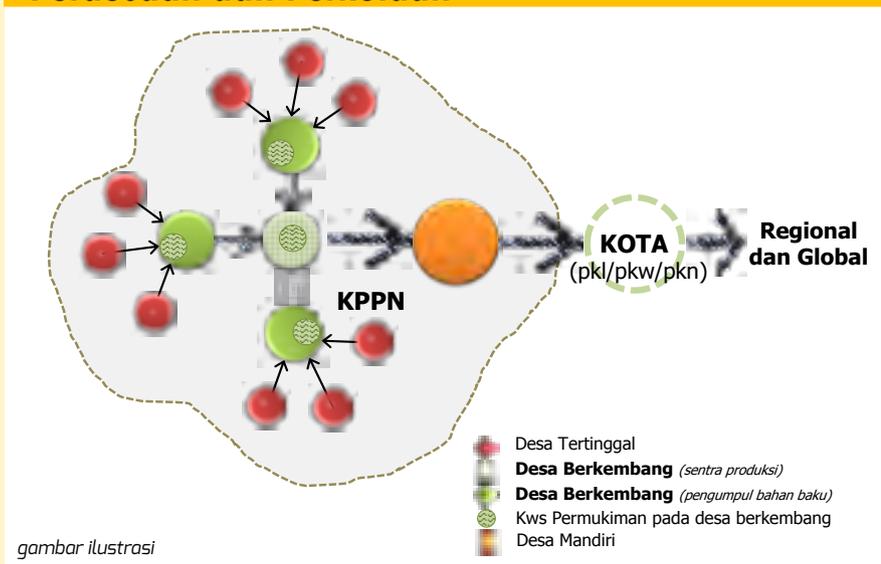


Melalui KTM, rencana pengembangan pemenuhan kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan disatukan untuk memenuhi fungsi-fungsi perkotaan

pusat kegiatan industri pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Selain itu dapat memenuhi fungsi perkotaan seperti pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, sarana pemerintah, serta fasilitas umum dan sosial. Kesepakatan dukungan infrastruktur dari hasil peninjauan lapangan tim BPIW dan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada tahun ini, bahwa telah ditetapkan 7 KTM, yaitu KTM Rawa Pitu, Gerbang Kayong, Hialu, Tambora, Ponu, Kobisonta, dan Salor.

Sebelumnya, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengusulkan dukungan pengembangan infrastruktur di 38 KTM. Hal ini tertuang didalam surat usulan No. S-055/M-DPDTT/01/2017 tanggal 27 Januari 2017. Dukungan penanganan infrastruktur meliputi jalan yang sudah berstatus, sarana air bersih (SAB), irigasi, dan drainase di kawasan KTM melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. **Tim Redaksi**

Konsep Keterkaitan Penanganan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan



gambar ilustrasi

Pengembangan Wilayah Berbasis Teknologi

(Bagian 1)



Dr. Doedoeng Zenal Arifin, ST, MT

*Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan
Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW*

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR adalah unit yang baru dibentuk di lingkungan Kementerian PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dengan tugas yang cukup penting tersebut, maka sudah seharusnya BPIW memiliki sistem kerja yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas itu. Dengan kata lain, bahwa ketika BPIW melakukan sinergi dan keterpaduan dengan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR, maupun dengan kementerian maupun lembaga lain, maka sudah semestinya antar unit kerja di BPIW melakukannya terlebih dahulu. Sebab, bagaimana BPIW bisa melakukan sinergi dengan pihak lain, kalau dalam unit kerja BPIW sendiri tidak melakukan sinergi.

*tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi

A. Konsep Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan program terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Agar tercipta tujuan-tujuan di atas, maka perencanaan tata ruang wilayah harus didukung oleh kebijakan-kebijakan sektoral, seperti kebijakan transportasi, pertanian, pendidikan dan lain-lain (Sugeng Tratomo, 1999).

Pertumbuhan wilayah merupakan hasil suatu proses dari dinamika perkembangan internal dan eksternal wilayah tersebut, baik ekonomi, sosial maupun politik. Pertumbuhan wilayah merupakan bagian dari pertumbuhan nasional, yang bisa dilihat sebagai partisipasi wilayah atau sebaliknya sebagai ukuran keteringgalan suatu wilayah. Ketidakmerataan pembangunan bila dilihat secara geografis atau spasial menunjukkan pentingnya pendekatan kewilayahan atau dimensi keruangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan atau pengembangan, dalam arti *development*, bukanlah semata-mata suatu kondisi atau suatu keadaan yang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya, dalam hal ini penduduk setempat. Sebaliknya, pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki, guna meningkatkan kualitas hidupnya, dan juga orang lain.

Jadi pengembangan harus diartikan sebagai keinginan untuk memperoleh perbaikan, serta kemampuan untuk merealisasikannya

(MT Zen, 1999). Pengertian di atas bermakna bahwa pengembangan wilayah, adalah salah satu upaya tentang bagaimana memberdayakan masyarakat setempat, terutama dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan setempat dengan kemampuan teknologi yang dimilikinya.

Pengembangan wilayah pada akhirnya tidak dimaksudkan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi lebih merupakan suatu proses perbaikan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan kesejahteraan masyarakat yang langgeng (*sustainable welfare*). Tujuan tersebut dapat dicapai apabila wilayah bersangkutan mempunyai kondisi yang dinamis untuk menghadapi persaingan.

Jadi pengembangan wilayah mempunyai arti yang lebih luas lagi, yaitu upaya mensinergikan secara terpadu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi,

dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri, dan secara keseluruhan dalam jangka panjang berakibat pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

B. Paradigma Baru Pengembangan Wilayah

Teori-teori tentang pengembangan wilayah secara umum menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan wilayah adalah merupakan fungsi dari sumberdaya alam, tenaga kerja, investasi kapital, kewiraswastaan, komunikasi, transportasi, komposisi industri, teknologi, besaran wilayah, pasar ekspor, situasi pasar internasional, kapasitas birokrasi lokal dan nasional serta

Pengembangan wilayah mempunyai arti yang lebih luas lagi, yaitu upaya mensinergikan secara terpadu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi



ilustrasi teknologi

kinerja kelembagaan pemerintahan (Edward J. Blakely, 1989).

Secara umum, pengembangan wilayah diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat, sehingga seringkali kemajuan yang dimaksud dalam pengembangan wilayah terutama adalah kemajuan material.

Untuk mengukurnya, pembangunan wilayah seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Dengan demikian dalam perencanaan pengembangan dan pembangunan wilayah, keberhasilannya selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi. Sebagai contoh, sebuah pemerintahan dianggap berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakatnya cukup tinggi, atau di atas rata-rata nasional.

Indikator-indikator tersebut adalah Produk Nasional Bruto (PNB atau *Gross National Product* = GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB atau *Gross Domestic Product* = GDP), atau untuk wilayah/ region digunakan ukuran GRDP (*Gross Regional Domestic Product*). Dengan demikian, pembangunan wilayah dari sisi ekonomi diartikan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan sebuah wilayah atau negara untuk skala yang lebih luas.

Indikator-indikator ekonomi yang disebutkan tadi, tidaklah menggambarkan tentang kekayaan yang dimiliki oleh penduduknya, atau dengan kata lain bahwa tidak berarti kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Dengan demikian pula dapat disebutkan bahwa indikator-indikator tadi tidaklah mencerminkan kesejahteraan penduduknya.

Sebagai contoh, pengembangan industri pertambangan di Freeport - Provinsi Papua menunjukkan bahwa proses produksi yang berjalan di wilayah itu, hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan tersebut. Hanya sebagian kecil keuntungan yang diterima oleh masyarakat di wilayah tersebut, bahkan sebaliknya akibat kegiatan pertambangan tersebut, dalam jangka panjang akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang cukup luas.

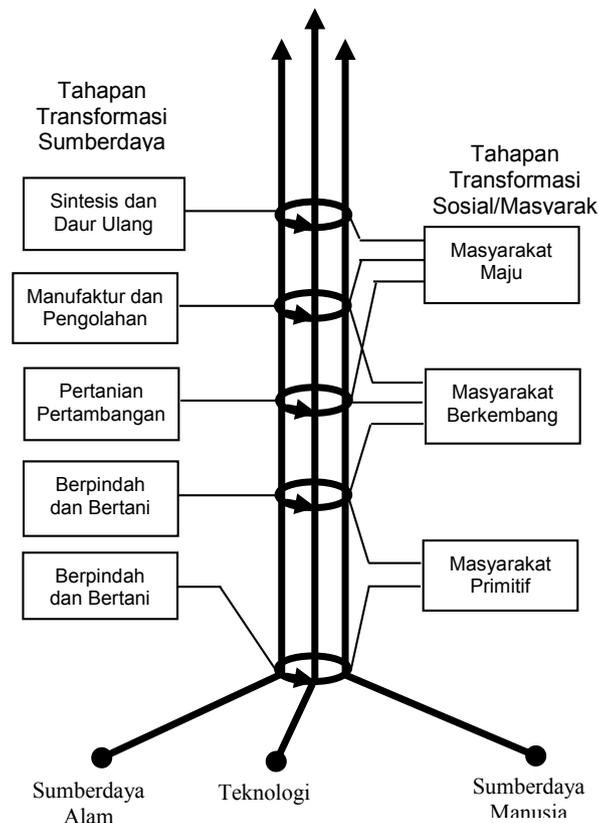
Sudut pandang tentang pengembangan wilayah itu, perlu diubah, karena pola pembangunan wilayah seperti itu tidak akan mampu menyelesaikan persoalan klasik pengembangan wilayah, yaitu kesenjangan antar wilayah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 23/2014

tentang Pemerintahan Daerah, maka sudah saatnya dipikirkan tentang paradigma baru dari pengembangan wilayah. Sejalan dengan perubahan visi dan misi pengembangan wilayah yang mengarah pada penguasaan spesialisasi unit-unit kecil otonom, strategi pengembangan wilayah hanya dapat dijalankan melalui dua pendekatan utama, yakni inovasi dan pembaharuan.

Berkaitan dengan hal di atas, muncul pandangan baru dalam pengembangan wilayah, yaitu wilayah dapat dianalogkan sebagai suatu perusahaan yang besar, yang memiliki elemen-elemen pokok yang saling terkait satu sama lainnya.

Peningkatan Kapabilitas Elemen Pengembangan Wilayah



Suatu wilayah dipandang sebagai sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi. Elemen pokok yang membentuk sistem wilayah adalah sumber daya alam, sumber daya manusia dan kemampuan teknologi internalnya. Secara alamiah ketiga elemen tersebut berinteraksi membentuk sistem transformasi *input* menjadi *output* dengan jenis yang berbeda-beda (sektor-sektor ekonomi) (Ati Widiati, 1990).

Akumulasi dari tarnsformasi-transformasi tersebut menghasilkan kinerja pertumbuhan wilayah secara keseluruhan. Keterkaitan antar elemen dan proses transformasi perkembangan suatu wilayah menurut cara pandang baru ini seperti terlihat pada Gambar 2.1.

Cara pandang itu, melihat bahwa suatu sistem wilayah memiliki tingkatan-tingkatan yang bersifat hirarki dalam proses perkembangan masyarakatnya. Transformasi dari satu tingkatan menuju tingkatan di atasnya ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia setempat dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya.

Pada konteks kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam inilah melekat elemen pilar ketiga pengembangan wilayah, yaitu teknologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses perubahan perkembangan masyarakat suatu wilayah merupakan cerminan dari transformasi teknologi di wilayah yang bersangkutan (Ati Widiati, 1990).

Kemajuan teknologi (*technology progress*) pada milenium ketiga ini telah mengubah dunia menjadi lebih dinamis dan terhubung secara *real time*. Teknologi telah memungkinkan berbagai negara maupun perusahaan mampu meningkatkan daya saing mereka, baik



Ilustrasi kawasan perkotaan

berupa efisiensi produksi maupun dalam bentuk kualitas barang yang dihasilkan.

Di samping itu, teknologi juga dapat menghilangkan kelemahan yang terdapat pada faktor-faktor produksi. Sebagai contoh, Israel yang pada dasarnya merupakan negara padang pasir yang kering, ternyata kini sanggup menjadi salah satu negara pengekspor sayuran dan buah-buahan terbesar di Timur Tengah. Sementara itu, dalam sistem kemasyarakatan (*society sistem*), telah terjadi perubahan yang mendasar yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran akan kebebasan/ demokrasi, kemandirian/ otonomi, keterbukaan/ transparansi, serta meningkatnya kreativitas masyarakat.

Proses perubahan seperti ini nampak dengan jelas telah berlangsung di kawasan Asia dan Afrika, di mana fase awal perubahan tersebut seringkali dicirikan oleh suatu gejala sosial politik di negara-negara yang bersangkutan. Namun demikian, perkembangannya jelas mengarah pada sistem kemasyarakatan yang lebih terbuka.

Fenomena di atas tentu saja menuntut adanya paradigma

baru dalam pengembangan wilayah, jika tidak ingin tersisih dalam persaingan. Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan tinggi dengan mengandalkan keunggulan komparatif berupa kekayaan yang berlimpah dan upah buruh yang murah, sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan tinggi dengan mengandalkan keunggulan komparatif berupa kekayaan yang berlimpah dan upah buruh yang murah, sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

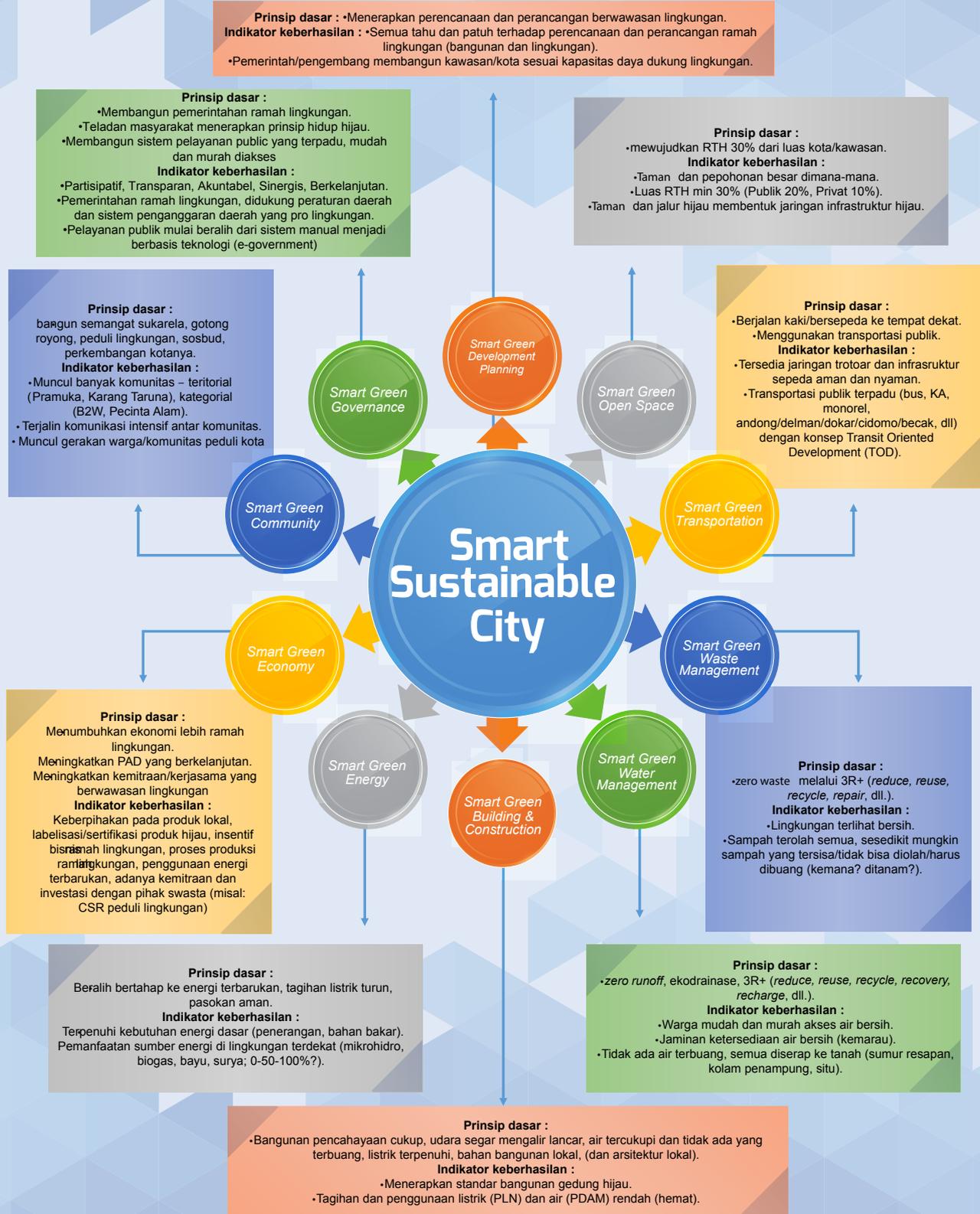
Meskipun teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) telah bergeser dari hanya memperhitungkan faktor-faktor produksi (tanah, buruh, sumber daya alam dan modal) berkembang menjadi kebijakan pemerintah di bidang moneter dan fiskal, ternyata daya saing tidak lagi terletak pada faktor-faktor tersebut. Daya saing tidak dapat diperoleh dari faktor upah rendah, tingkat bunga rendah, maupun subsidi saja, tetapi bisa pula didapat dari kemampuan mereka untuk melakukan perbaikan dan inovasi secara berkesinambungan.

Fenomena pengembangan wilayah abad ke-21 akan dicirikan oleh bergesernya strategi pengembangan dari keunggulan komparatif suatu wilayah kepada **strategi pengembangan wilayah yang didasarkan pada keunggulan daya saing**. Strategi-strategi untuk meningkatkan daya saing inilah yang akan menjadi dasar dari konsep pengembangan wilayah di masa mendatang.

ELEMEN-ELEMEN SMART SUSTAINABLE CITY

Ada 11 elemen dalam *Smart Sustainable City* atau Kota Cerdas Berkelanjutan. Kesebelas elemen itu adalah *Smart Green Planning and Design*, *Smart Green Open Space*, *Smart Green Transportation*, *Smart Green Waste*, *Smart Green Water*, *Smart Green Building*, *Smart*

Green Energy, *Smart Green Economy*, *Smart Green Community*, dan *Smart Green Government*. Prinsip dasar dari pelaksanaan 11 elemen *Smart Sustainable City* ini adalah diterapkannya perencanaan dan perancangan yang berwawasan lingkungan.



Obras

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

BANG EGI



Kartunis: Muhammad Nadjib

Menikmati Keramahan dan Romantika Kota Yogyakarta

Ingatkah anda dengan sebuah lirik lagu dari KLa Project yang mengingatkan akan keunikan dan keramahan kota Yogyakarta?. Liriknya seperti : “Pulang ke kotamu ada setangkup haru dalam rindu, masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat penuh selaksa makna, terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja”.

Penggalan syair tersebut tidak akan pernah hilang dari ingatan dan selalu membuat kita semakin mencintai kota Jogja dan suasana keramahannya.

Ketika mendengar nama Yogyakarta, kita semua akan berpikir mengenai keunikan kota ini. Yogyakarta yang nama lengkapnya “Daerah Istimewa Yogyakarta” ini, diambil dari dua kata yaitu “Ayogya” yang berarti “kedamaian” dan “Karta” yang berarti “baik”. Secara geografis kota ini terletak di lembah 3 sungai yakni Sungai Winongko, Sungai Code, dan Sungai Gajahwong.

Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar karena banyaknya universitas terkemuka di kota ini, salah satu diantaranya adalah Universitas Gajah Mada. Hal inilah yang membuat kota ini memiliki jumlah mahasiswa yang cukup besar, yang tidak

hanya berasal dari Jawa melainkan dari luar Jawa bahkan dari luar Indonesia. Dalam konsep Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dikembangkan Kementerian PUPR, di Yogyakarta terdapat 2 WPS, yakni WPS 10 Yogyakarta-Surakarta-Semarang, dan WPS 12 Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang.

Tidak hanya itu saja, Yogyakarta juga memiliki beberapa tempat wisata yang menarik dikunjungi. Berikut beberapa tempat wisata menarik di kota gudeg ini.

Secara geografis Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai yakni sungai Winongko, Sungai Code, dan sungai Gajahwong.

Waduk Sermo

Waduk Sermo merupakan daerah yang identik dengan berbagai wisata menarik. Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya, tempat ini mungkin sudah tidak asing lagi. Waduk buatan yang diresmikan oleh Presiden Suharto ini merupakan tempat favorit bagi para pemancing, karena waduk sermo ini di dominasi oleh ikan nila, tombro, gurameh dan juga red devil.

Waduk ini berada di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta dan berada di atas perbukitan menoreh yang berbatasan langsung dengan hutan suaka marga satwa Sermo. Waduk Sermo merupakan wisata alam yang sangat alami. Keindahan Waduk Sermo dapat dinikmati sepanjang 21 kilometer yang berbentuk lingkaran dan beraspal. Selain itu, kita juga dapat menikmati keindahan Waduk Sermo Yogyakarta dengan perahu wisata air.

Berbagai aktivitas juga dapat kita lakukan diantaranya bersepeda, jogging atau bahkan memancing di Waduk Sermo. Pemerintah Daerah tidak hanya memanfaatkan Waduk Sermo sebagai tempat liburan keluarga saja melainkan digunakan sebagai irigasi untuk mengairi sawah atau daerah sekitarnya. Di sana juga ada kantor pengelolaan Waduk Sermo yang dapat memberikan info lengkap terkait waduk tersebut.

Kalibiru

Kalibiru merupakan salah satu wisata alam yang terdapat di daerah kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada umumnya akses menuju ke Kalibiru memiliki beberapa rute yang dapat ditempuh. Jika dari pusat kota Jogja, kita dapat memilih rute perjalanan dari



Yogyakarta – Wates – Waduk Sermo atau Yogyakarta – Sentolo – Waduk Sermo.

Tak hanya itu saja akses menuju ke wisata Kalibiru, kita juga dapat memilih jalan rute alternatif dari arah Clereng. Kalibiru ini mempunyai ketinggian 450 mdpl.

Dari puncaknya, pengunjung dapat melihat Waduk Sermo dari atas bukit, bahkan jika cuaca cerah, nampak dari kejauhan putihnya ombak pantai selatan. Dahulunya, Kalibiru ini merupakan sebuah desa yang sangat tandus, akan tetapi dengan usaha para penduduk untuk menghidupkan desa.

Kini wisata kalibiru dapat pula meningkatkan perekonomian dan menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar. Untuk melihat pemandangan yang indah kita dapat memanjat pohon pinus yang terletak di pinggir jurang tersebut telah terpasang tangga gantung dan papan kayu duduk bersantai.

Taman Sari

Taman Sari Yogyakarta atau Taman Sari Keraton Yogyakarta merupakan situs bekas taman atau kebun istana keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Taman ini terletak sangat dekat dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 15 menit dari alun – alun utara keraton.

Tempat ini dulunya merupakan tempat rekreasi bagi keluarga kerajaan sekaligus sebagai benteng pertahanan yang dibangun pada tahun 1758 – 1765 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Taman yang mendapat sebutan *The Fragrant Garden* itu memiliki luas lebih dari 10 hektare dengan sekitar 57 bangunan berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air.

Istana Air Taman Sari Yogyakarta mempunyai 4 kompleks, yaitu: danau buatan yang terletak di sebelah barat, pemandian umbul binangun yang terletak di sebelah selatan danau buatan, pasarean ledok sari dan kolam garjitawati, terletak di sebelah selatan umbul binangun, bagian sebelah timur yang memanjang dari pemandian umbul binangun sampai pasarean ledok sari dan kolam garjitawati merupakan danau dengan pulau buatan serta jembatan gantung dan kanal.

Saat ini Istana Air Taman Sari merupakan salah satu cagar budaya di Yogyakarta yang telah menjadi tempat wisata populer di kota ini.

Museum Ullen Sentalu

Museum Ullen Sentalu merupakan salah satu museum kebanggaan warga Jogja karena tempat ini pernah dinobatkan sebagai

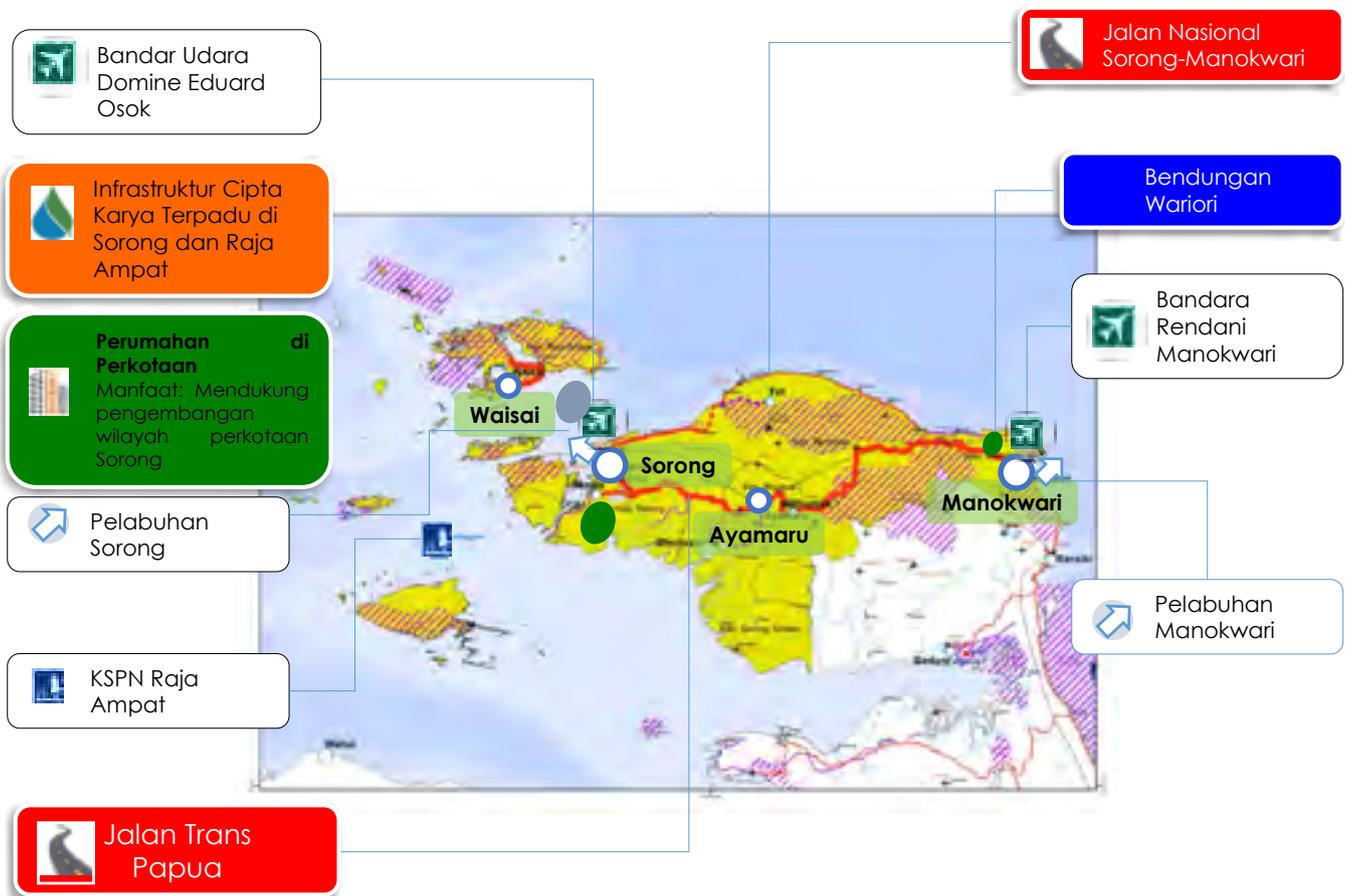
museum terbaik di Indonesia. Museum yang terletak di Taman Kaswargan, Kaliurang Jl. Boyong Km 25 Kaliurang Barat ini beroperasi dibawah naungan yayasan Ulatung Blencong yang juga berfungsi sebagai jendela peradaban seni dan budaya Jawa.

Berbeda dengan museum-museum lain, museum ini mengembangkan paradigma baru dengan berbagai hal yang unik dan diaplikasikan agar dapat menjadi museum yang menarik dan berbeda dengan yang lain. **(Indira/infobpiw)**



Wilayah Pengembangan Strategis 31 SORONG – MANOKWARI

ULTIMATE WPS 31 SORONG – MANOKWARI 2025



Ultimate:

Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai dengan tahun 2025 di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 31 Sorong – Manokwari seperti pembangunan infrastruktur jalan Nasional Sorong – Manokwari, dan pembangunan jalan Trans Papua. Dalam bidang keciptakarya membangun infrastruktur Cipta Karya terpadu di Sorong dan Raja Ampat. Untuk bidang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR juga membangun bendungan Wariori. Selain itu juga dibangun perumahan di perkotaan. Dukungan infrastruktur juga dilakukan terkait pembangunan Bandar Udara Domine Eduard Osok dan juga Bandara Rendani Manokwari. Kemudian Kementerian PUPR juga mendukung Pelabuhan Sorong dan Manokwari dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Raja Ampat.

Program Utama:

Program Utama di WPS 31 antara lain pembangunan peningkatan Jalan Nasional Paragraf Kota Sorong – Manokwari dan pembangunan jalan Mega. Dibidang Keciptakarya dilakukan peningkatan kapasitas dan sistem perpipaan PDAM Kabupaten Raja Ampat, Peningkatan Kapasitas dan Sistem perpipaan PDAM Kota Sorong, dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Sorong. Selanjutnya juga dilakukan Peningkatan Kapasitas dan Sistem perpipaan PDAM Kabupaten Manokwari. Dalam Bidang Sumber Daya Air terdapat beberapa pembangunan seperti pembangunan Daerah Irigasi (DI) Sidei Kabupaten Manokwari, Bendungan Wariori Kabupaten Manokwari, dan Jaringan DI Primer Oransbari Manokwari Selatan. Dalam Bidang perumahan terdapat pembangunan rumah untuk masyarakat sebanyak 200 unit.

Wilayah Pengembangan Strategis 32

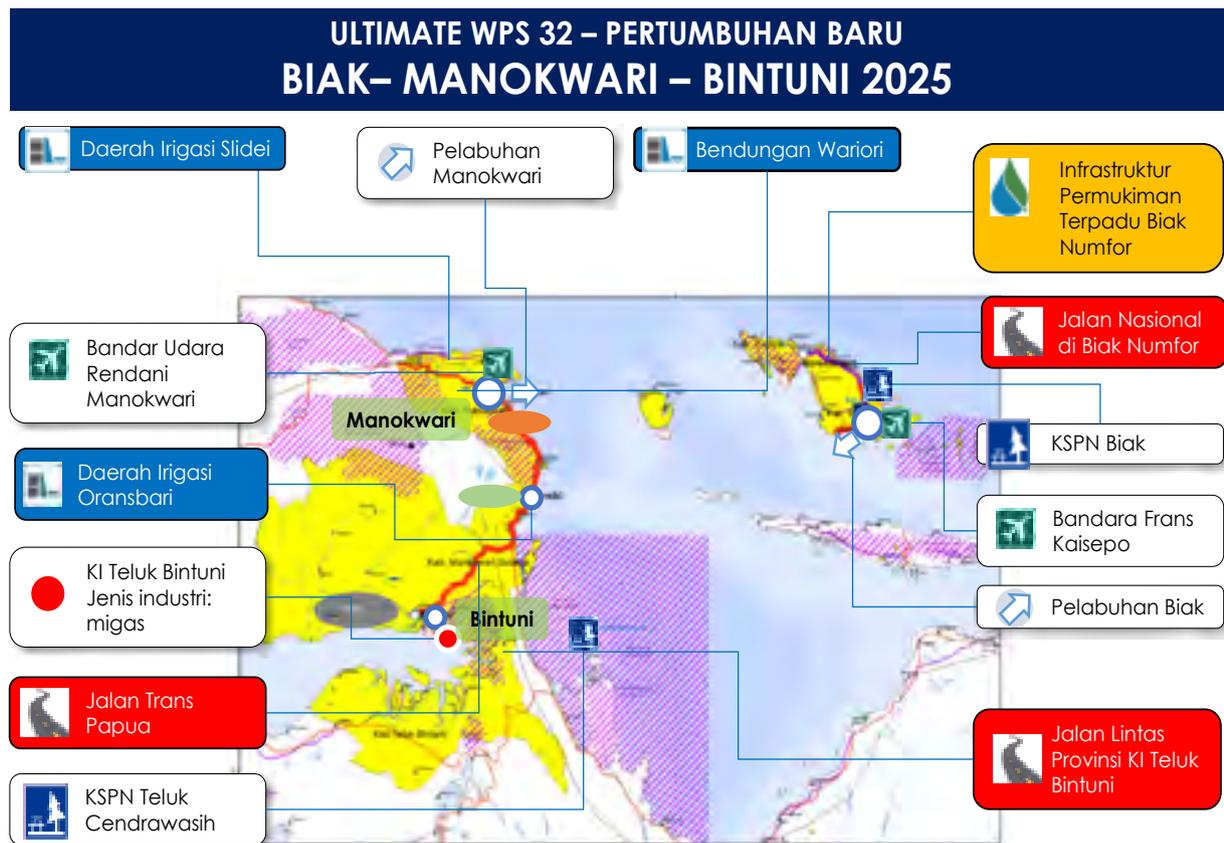
BIAK – MANOKWARI – BINTUNI

Ultimate:

Pembangunan Infrastruktur PUPR sampai dengan tahun 2025 di WPS 32 Biak – Manokwari – Bintuni meliputi pembangunan Jalan Nasional di Biak Numfor, pembangunan jalan lintas Provinsi KI Teluk Bintuni, dan pembangunan Jalan Trans Papua. Dibidang Cipta Karya, dilakukan pembangunan infrastruktur permukiman terpadu Biak Numfor, Daerah Irigasi Slidei, pembangunan daerah irigasi Oransbari, dan bendungan Wariori. Dukungan Kementerian PUPR juga terkait pembangunan pelabuhan Manokwari, Biak, Bandar Udara Rendani Manokwari, dan bandara Frans Kaisepo. Kementerian PUPR juga mendukung KSPN Biak dan Teluk Cendrawasih, serta Kawasan Industri Teluk Bintuni.

Program Utama:

Program Utama di WPS 32 antara lain pembangunan jalan yang meliputi pembangunan jalan Mameh – Windesi – Ambuni, Windesi – Bofuer – Wahoma, dan Tandia – Sanderawoi – Nabire. Kemudian juga ada peningkatan ruas jalan strategis nasional Maruni – Oransbari, ruas jalan strategis nasional Biak Numfor, dan ruas jalan strategis nasional Poros kab Manokwari – Teluk Bintuni. Di bidang Cipta Karya, Kementerian PUPR membangun penataan kawasan permukiman kumuh kabupaten Biak Numfor. Di bidang Sumber Daya Air dilakukan pembangunan DI Sidei kabupaten Manokwari, Bendungan Wariori Kabupaten Manokwari, dan juga jaringan DI Primer Oransbari Manokwari Selatan.



Aspal Plastik, Stabilitas Jalan Meningkatkan 40 Persen

Beragam inovasi telah dikembangkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setelah Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), Balitbang berinovasi dalam pengembangan teknologi pemanfaatan limbah plastik untuk material perkerasan infrastruktur jalan berupa aspal plastik. Pengembangan teknologi ini dilatarbelakangi jumlah sampah plastik yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hingga 2019 mendatang, limbah tak terurai ini diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang ada di seluruh Indonesia.

Dari jumlah ini, potensi limbah plastik yang dapat diubah pemanfaatannya menjadi jalan sepanjang 190.000 kilometer. Estimasi ini berdasarkan asumsi plastik yang digunakan sebanyak 2 hingga 5 ton untuk setiap 1 kilometer jalan.



Pemanfaatan limbah plastik sebagai campuran aspal

Sumber: Balitbang PUPR



Ujicoba aspal plastik di Universitas Udayana Bali

Sumber: Balitbang PUPR

Teknologi ini telah diimplementasikan pertama kali di area Universitas Udayana, Bali, dan Jalan Raya Sri Ratu Mahendradatta, pada 28-29 Juli 2017

Teknologi ini telah diimplementasikan pertama kali di area Universitas Udayana, Bali, dan Jalan Raya Sri Ratu Mahendradatta, pada 28-29 Juli 2017. Uji coba terhadap jalan dengan total panjang 700 meter ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi daya tahan, dan seberapa kuat daya rekat aspal plastik.

Hasil sementara, aspal dengan tambahan material sampah plastik jauh lebih lengket, secara teknis stabilitasnya lebih baik jika dibandingkan aspal non plastik. Dana yang dibutuhkan untuk mengaspal jalan sepanjang 700 meter tersebut sekitar Rp 600 juta untuk satu kali lapisan dengan ketebalan 4 sentimeter. Dapat menghemat biaya karena memiliki tingkat stabilitas 40 persen lebih tinggi dibanding aspal tanpa plastik. Pasalnya, jalan dengan aspal tanpa plastik harus dilapisi berulang untuk mencapai stabilitas yang baik. Teknologi pemanfaatan limbah plastik menjadi aspal jalan ini merupakan solusi sekaligus bagian dari aksi nasional mereduksi sampah di seluruh Indonesia.

Selain di Bali, Balitbang Kementerian PUPR juga akan melakukan uji coba di jalan nasional di wilayah Bekasi yakni Jalan Raya Bekasi-Cikarang pada pertengahan Agustus 2017. Panjang jalannya sekitar 2 kilometer dengan lebar 14 meter. Dengan melibatkan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI). Nantinya replikasi jalan aspal plastik ini juga akan dilakukan di 16 kota yang limbah plastiknya dapat dipasok ADUPI.

Tinjauan BPIW ke kota Baru Publik Tanjung Selor

Tim BPIW yang dipimpin langsung Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan melakukan peninjauan langsung ke Kota Baru Publik Tanjung Selor. Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangka menyerap informasi dan data terbaru untuk akselerasi pengembangan kota baru tersebut.



Keberadaan jalan dan lahan untuk jalan di Tanjung Selor dipastikan telah memadai.



Tim BPIW Kementerian PUPR bersama Tim Pemprov Kaltara dan Balai Penataan Bangunan Kaltara, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.



Pembahasan proyek infrastruktur PUPR di Tanjung Selor



Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan meninjau lahan

Fun Bike Menyambut HUT RI ke-72

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar *fun bike*, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-72, (20/8). Kegiatan yang dimulai dari Kantor Kementerian PUPR pada pukul 06.00 ini, diikuti seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kementerian PUPR termasuk dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Berikut dokumentasi kegiatannya.



Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) siap mengiringi peserta *fun bike* dengan motor



Kecerian peserta dari BPIW usai mengayuh sepeda



Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kampanyekan kartu tol



Para peserta *fun bike* bernyanyi bersama

Upacara HUT RI ke-72 Semarak Dengan Pakaian Daerah

Peringatan HUT RI ke-72 diperingati Kementerian PUPR dengan melakukan upacara bendera. Namun upacara bendera pada 17 Agustus kali ini, berbeda dengan sebelumnya. Hampir seluruh staf hingga jajaran pimpinan termasuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menggunakan pakaian daerah. Upacara pun semarak dengan pakaian tradisional dari seluruh provinsi di Indonesia tersebut. Berikut dokumentasinya.



Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memimpin upacara bendera



Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono ditengah-tengah pegawai yang berpakaian khas daerah



Jajaran pimpinan BPIW beserta Istri dengan pakaian daerah



Peserta upacara bendera dari BPIW

Gateball Menyambut HUT RI Ke-72

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin langsung oleh Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan melakukan pembukaan pertandingan *Gateball* yang diikuti oleh seluruh Pegawai yang ada di lingkungan BPIW.



Kepala BPIW Memeragakan olahraga *Gateball* sebagai simbol dibukanya perlombaan Gateball BPIW



Pembukaan Perlombaan *Gateball* BPIW



Peserta sedang latihan



Kemeriahan dalam lomba

10 Jembatan Terkenal di Tanah Air

Pengembangan infrastruktur pada suatu negara pada hakekatnya merupakan upaya untuk membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pasalnya, dalam mencapai kemajuan ekonomi senantiasa memerlukan infrastruktur yang memadai. Salah satu infrastruktur yang dibangun untuk mengembangkan sistem konektivitas yang baik adalah jembatan.

Ada 10 jembatan di Indonesia yang terkenal dan memiliki fungsi yang vital dalam hal mobilisasi orang ataupun barang. Kesepuluh jembatan tersebut adalah Jembatan Ampera di Kota Palembang (Sumatera Se-

latan), Suramadu di Madura (Jawa Timur), dan Pasupati di Bandung (Jawa Barat).

Kemudian ada Jembatan Siak /Jembatan Tengku Agung Sultanah Lati-fah (Riau), dan Merah Putih di Kota Ambon (Maluku).

Selain itu, Jembatan Barito di Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Mahakam Ulu Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Rumpiang Banjar-masin (Kalimantan Selatan), Bareleng Kota Batam (Kepulauan Riau), dan Jembatan Soekarno Kota Manado (Sulawesi Utara).



Jembatan Ampera, Palembang Provinsi Sumatera Selatan



Jembatan Nasional Suramadu, Madura, Jawa Timur



Jembatan Pasupati, Bandung, Provinsi Jawa Barat



Jembatan Tengku Agung Sultanah Lati-fah, Siak, Provinsi Riau



Jembatan Merah Putih, Ambon, Provinsi Maluku



Jembatan Barito, Banjarmasin Provinsi Kalimantan



Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) Samarinda Provinsi Kalimantan Timur



Jembatan Rumpiang, Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan



Jembatan Barelang, Batam Provinsi Kepulauan Riau



Jembatan Soekarno, Manado Provinsi Sulawesi Utara

7 Tips Menjaga Hubungan Baik Dengan Atasan



Mampu menjalin hubungan baik dengan atasan di kantor membuat efektifitas dan efisiensi kerja semakin lebih baik. Hubungan baik di sini, bukan berarti berusaha untuk menjadi teman dekat atau memudahkan batasan antara atasan dan bawahan. Tapi bagaimana anda menunjukkan performa kerja dan efektifitas komunikasi agar mendapat atensi lebih dari atasan.

Cara yang ditempuh, tentu saja harus dilakukan secara profesional. Bukan dengan merayu, memberikan hadiah atau menyenjungnya dengan kata-kata manis. Ada tujuh tips yang bisa anda terapkan untuk meningkatkan hubungan kerja dengan atasan.

1. Fokuskan untuk mengerjakan tugas dengan benar dan tepat waktu.

Hindari pulang kantor terlalu cepat atau terlalu larut. Jika anda berpikir dengan selalu pulang larut malam akan membuat atasan terkesan, itu salah. Kerja lembur atau sampai larut malam terlalu sering, justru akan membuat atasan berpikir anda terlalu lamban dalam bekerja. Atasan juga bisa menganggap anda orang yang terlalu serius dan ambisius.

Percaya atau tidak, bos juga ingin anak buahnya senang yang tidak selalu stres memikirkan pekerjaan. Karyawan yang bahagia, berarti senang dengan pekerjaannya dan bisa mengerjakan tugas dengan baik.

2. Ingat, setinggi apapun jabatan atasan, dia tetap manusia yang kadang bisa stres

Jika anda melihat atasan sedang bingung atau punya masalah dalam pekerjaan, tak ada salahnya menawarkan bantuan padanya. Tapi pastikan anda tahu bisa menyelesaikannya. Bila masalah tersebut bisa Anda pecahkan, maka atasan akan mengapresiasi anda.

Kuncinya adalah, anda tahu kapan harus menawarkan bantuan. Jika tidak terlalu darurat, biarkan atasan mengatasi masalahnya sendiri. Terlalu sering membantu atasan justru akan membuat anda tampak berusaha mencari muka untuk mendapatkan jabatan tertentu.

3. Jangan mengumbar janji manis soal pekerjaan Anda.

Hindari berjanji kepada atasan kalau Anda bisa kerja melebihi target. Sementara Anda pun belum yakin bisa mencapainya. 'Banyak bekerja sedikit bicara' adalah konsep paling tepat untuk menjalin hubungan baik dengan atasan. Beri kejutan pada atasan Anda dengan menunjukkan hasil yang memuaskan tanpa dia tahu sebelumnya.

4. Bila atasan menanyakan masalah, berikan fakta sejas-jelasnya.

Jangan anda kurangi maupun dilebih-lebihkan, meskipun anda mengetahui bukan informasi tersebut yang ingin dia dengar. Karyawan yang jujur ketika menghadapi situasi sulit, akan lebih dihargai ketimbang pekerja yang berusaha menutupi kenyataan

untuk lari dari masalah. Hal ini juga berlaku bila atasan bertanya tentang keadaan anda di kantor.

5. Jadilah karyawan yang proaktif.

Ambil inisiatif untuk bertanya mengenai apakah ada pekerjaan lain yang harus ditangani (bila anda mampu mengerjakannya). Beritahukan kepada atasan bila anda bisa dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar, dan berusahalah untuk menyelesaikannya dengan benar dan tepat waktu.

6. Bersikap ramah pada setiap orang di tempat kerja.

Mulai dari atasan, rekan kerja sampai office boy. Jangan lupa ucapkan salam dan beri senyuman setiap berpapasan dengan orang yang anda kenal di lingkungan kantor. Dengan sikap ini, atasan akan melihat Anda sebagai pribadi yang menyenangkan dan bisa diajak kerja sama.

7. Anda bisa coba bersosialisasi dengan atasan di luar kantor, asal tahu batasannya.

Bila sesekali bos mengajak Anda makan di luar sebagai apresiasi atas kinerja yang baik, jangan sungkan menerima ajakannya. Momen ini bisa anda manfaatkan untuk mengenal atasan lebih dekat. Buka topik obrolan mengenai hobi, kegiatan bersama anak-anaknya saat akhir pekan atau bacaan favoritnya. Tapi hindari obrolan yang terlalu personal.

Infrastruktur di Kaltara Alami Kemajuan Signifikan

Irianto Lamrie

Gubernur Kaltara

Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyambut antusias banyaknya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan negara. Terlebih, saat ini pembangunan tersebut sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kawasan perbatasan di Kaltara.

"Program Nawacita mayoritas telah terwujud. Terutama, Nawacita Membangun Indonesia dari Pinggiran, manfaat program tersebut telah banyak dirasakan masyarakat," ungkap Gubernur Kaltara, Irianto Lamrie saat ditemui media termasuk "Sinergi" di Tarakan, beberapa waktu lalu.

"Keberadaan PLBN di Sei Pancang Pulau Sebatik memang sangat penting karena berhadapan langsung dengan Kota Tawau Negeri Sabah," tegas Irianto.

Irianto menjelaskan, Nawacita telah banyak memacu peningkatan infrastruktur di Kaltara mulai dari akses jalan perbatasan, jalan tembus, fasilitas listrik, pembangunan sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

"Kendati terus perlu ada peningkatan, namun secara umum kawasan perbatasan di Kaltara sudah mengalami kemajuan signifikan," ungkap Irianto.

Untuk semakin memantapkan pembangunan di perbatasan negara yang ada di Kaltara, lanjutnya, Pemrov Kaltara Utara telah mengusulkan tiga lokasi pembangunan PLBN baru. Usulan tersebut dilakukan sehubungan ketiga titik itu situasi perlintasannya sangat padat, sehingga sangat rawan terjadi penyelundupan barang-barang terlarang.

Ketiga lokasi yang diusulkan pembangunan PLBN adalah Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau dan dua lokasi di Kabupaten Nunukan yakni Long Midang Kecamatan Krayan dan Labang Kecamatan Lumbis Ogong.

Irianto mengatakan, secara kasat mata dua lokasi yang paling berpotensi dibangun PLBN yakni Long Midang dan Labang. "Meningkat kepadatan perlintasan dari dan ke Negeri Sabah, Malaysia," jelasnya.

Saat ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 6/2015, lanjut Irianto, Provinsi Kaltara telah mendapatkan satu PLBN yakni Sei Pancang Pulau Sebatik yang pembangunannya sedang berlangsung.

"Keberadaan PLBN di Sei Pancang Pulau Sebatik memang sangat penting karena berhadapan langsung dengan Kota Tawau Negeri Sabah," tegas Irianto.

Sementara terkait percepatan pengembangan Kota Baru Tanjung Selor, Irianto mengaku sudah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulungan melaksanakan pengadaan tanahnya.

Ia mengatakan, dari 2.790 hektare lahan yang direncanakan untuk pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, saat ini baru tersedia 500 hektare lahan. "Untuk itu pembebasan lahan perlu percepatan, agar pembangunan fisik infrastruktur di kota baru dapat dipercepat," katanya. **(Daris/infoBPIW)**



